

**UPAYA PENGENTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI TENGAH
KEMISKINAN**

**(Studi pada Program *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh:

Armi Widyowianti Putri

1906026189

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Armi Widyowianti Putri
NIM : 1906026189
Jurusan : Sosiologi
Judul Skripsi : Upaya Pengentasan Anak Tidak Sekolah di Tengah Kemiskinan
(Studi pada Program *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023


Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Penulisan

Bidang Substansi Materi


Dr. H. Moehamad Parmudi, M.Si.

NIP. 196904252000031001


Siti Azizah, M.Si.

NIP. 199206232019032016

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PENGENTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI TENGAH KEMISKINAN

(Studi pada Program *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang)

Disusun Oleh:

Armi Widyowianti Putri

(1906026189)

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Sekretaris



Ririh Megah Safitri, M.A.

NIP. 199209072019032018

Penguji II



Naili Ni'matul I, M.A.

NIP. 199101102018012003

Penguji I



Ririh Megah Safitri, M.A.

NIP. 199209072019032018

Pembimbing I



Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si.

NIP. 196904252000031001

Pembimbing II



Siti Azizah, M.Si

NIP. 199206232019032016



Ketua

Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si.

NIP. 196904252000031001

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun di perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2023

Penulis,


Armi Widwianti Putri
Armi Widwianti Putri
1906026189

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Pengentasan Anak Tidak Sekolah di Tengah Kemiskinan (Studi pada Program Njuh Sekolah Maning di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”** dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa kendala apapun yang sangat berarti. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat muslim, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa’atnya di yaumil akhir. Adapun tujuan penyusunan laporan ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana dalam Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan karya skripsi ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak terdapat banyak kendala yang berarti tidak lepas dari adanya kerja sama dan dorongan dari beberapa pihak yang terkait, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosisologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Akhriyadi Sofian, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.

5. Siti Azizah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing kedua sekaligus wali dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan saran, serta telah sabar dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dosen-Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu dan pengetahuan baru yang membuat penulis dapat menyelesaikan Prodi Sarjana Sosiologi.
7. Seluruh staf tendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses administrasi penulisan skripsi.
8. Kedua orang tua saya dan kakak saya tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan yang luar biasa, serta doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana.
9. PIC Program *Njuh Sekolah Maning* Bapak Ikmaludin Aziz, S.Pd beserta tim koordinasi program *Njuh Sekolah Maning* Kabupaten Pemalang sebagai informan penulis yang telah bersedia dan membantu penulis untuk melakukan penelitian guna pemenuhan tugas akhir, sehingga penulis mendapatkan berbagai data-data yang mendukung penelitian ini.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yang sekaligus sebagai kantor kesekretariatan Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Drs. Andri Adi, M.Si selaku Camat Kecamatan Petarukan beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
13. Rekan-rekan Sosiologi E 2019 yang telah bersedia menjadi teman seperjuangan dan selalu memberikan semangat serta dukungan terhadap penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

14. Sahabat dan orang-orang yang penulis sayangi, Ahmad Alfarizi, Sitta Laelatul Fitriyani dan Assya yang selalu memberi support saya
15. Pihak-pihak lainnya yang terkait dalam membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan karya ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca yang membangun, sehingga dapat menjadi referensi atau acuan pada kesempatan lain dan berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Terimakasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh....

Semarang, 22 Mei 2023

Penulis,

Armi Widyowianti Putri

NIM. 1906026189

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrohmanirrohim

Dengan mengucap segala syukur Alhamdulillahilalamin, saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Darsito, Ibu Daniah beserta segenap keluarga yang tak henti-hentinya memeberikan kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa kepada saya sehingga saya mampu melewati langkah demi langkah untuk menggapai cita-cita saya.
2. Kepada Almamater tercinta Fakultas lmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

MOTTO

Pendidikan yang baik adalah dasar untuk masa depan lebih baik.

~ Najwa Shihab ~

ABSTRAK

Program *Njuh Sekolah Maning* (NSM) di Kabupaten Pemalang dilatarbelakangi karena banyaknya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pemalang. Data BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah ATS di Kabupaten Pemalang sebanyak 34.311 ATS. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu penyebab tingginya ATS di Kabupaten Pemalang adalah faktor kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2021, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah menjadi kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar keempat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 16,56%. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk menuntaskan ATS dengan membentuk Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tuntas Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan dampak dari Program NSM di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program NSM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data dan menyusun dalam suatu satuan yang selanjutnya dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta mendeskripsikan dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Sumberdaya Anthony Oberschall.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program NSM dilakukan dengan adanya kejelasan tujuan program, keterlibatan aktor pelaksana dan prosedur program yang dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain: 1) sosialisasi 2) pendataan 3) komunikasi antara pelaksana program dengan kelompok sasaran 4) pengembalian ATS 5) pendampingan ATS. Implementasi program NSM di Kecamatan Petarukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 Tahun di Kabupaten Pemalang. Dampak dari adanya program NSM terhadap pendidikan terlihat dari adanya peningkatan dari indikator keberhasilan sebuah program pada pendidikan, yaitu: 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2) Angka Partisipasi Murni (APM) 3) Angka Partisipasi Kasar (APK). Dampak terhadap ekonomi terlihat dengan adanya peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan ekonomi.

Kata Kunci: Upaya, Pengentasan Anak Tidak Sekolah, Kemiskinan, Program *Njuh Sekolah Maning*

ABSTRACT

The background for the Program *Njuh Sekolah Maning* (NSM) in Pemalang Regency is due to the large number of Non-Schooling Children (ATS) in Pemalang Regency. Data from BAPPEDA for Central Java Province shows the number of ATS in Pemalang Regency is 34,311 ATS. This resulted in a low Human Development Index (IPM) in Pemalang Regency in Central Java Province. One of the causes of the high ATS in Pemalang Regency is the poverty factor. According to Central Java Statistics Agency (BPS) data for 2021, Pemalang Regency, Central Java Province, is the district that has the fourth largest percentage of poor people in Central Java Province, namely 16.56%. This has become the government's concern to complete the ATS by establishing the Maning School Njuh Movement Program which was confirmed in the Regent's Regulation Number 40 of 2021 concerning 12 Years of Completion of Study in Pemalang Regency. The research objective was to determine the implementation and impact of the NSM Program in Petarukan District, Pemalang Regency.

In this study using qualitative research methods with a narrative approach. The location of this research is in Petarukan District, Pemalang Regency with the research subjects, namely the parties involved in the implementation of the NSM program. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation by examining all available data from various sources of collected data, studying the data and compiling it in a unit which is then categorized in the next stage and checking the validity and describing it with analysis according to the ability of the researcher's power. to make the researcher's conclusion. The theory used to examine this research uses Anthony Oberschall's Resource Mobilization Theory.

The results showed that the implementation of the NSM program was carried out with clarity of program objectives, involvement of implementing actors and program procedures carried out in several stages, including: 1) socialization 2) data collection 3) communication between program implementers and the target group 4) return of ATS 5) ATS assistance. The implementation of the NSM program in Petarukan District has been going well in accordance with the policy in the Regent's Regulation Number 40 of 2021 concerning the Pioneering Completion of 12 Years of Education in Pemalang Regency. The impact of the NSM program on education can be seen from the increase in the success indicators of a program in education, namely: 1) School Enrollment Rate (APS) 2) Pure Enrollment Rate (APM) 3) Gross Enrollment Rate (APK). The impact on the economy can be seen in the increase in human resources and the increase in the economy.

Keywords: Effort, Alleviation of Out of School Children, Poverty, Maning School Njuh Program

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TEORI MOBILISASI SUMBERDAYA_(<i>RESOURCH MOBILIZATION THEORY</i>)	25
A. Teori Mobilisasi Sumber Daya (<i>Resourch Mobiliation Theory</i>) Anthony Oberscall.....	25
1. Konsep Dasar Teori Mobilisasi Sumberdaya.....	25
2. Asumsi Dasar Teori Mobilisasi Sumberdaya.....	27
3. Istilah Kunci Teori Mobilisasi Sumberdaya.....	28

B. Kontekstualisasi Teori Mobilisasi Sumber Daya dalam Program <i>Njuh Sekolah Maning</i>	35
1. Organisasi Sosial	36
2. Pemimpin dan Kepemimpinan	37
3. Sumber Daya	38
4. Jaringan dan Partisipasi	41
5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat	42
BAB III PROFIL KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG DAN PROGRAM <i>NJUH SEKOLAH MANING</i>	43
A. Profil Umum.....	43
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Kondisi Topografis.....	45
3. Kondisi Demografi	46
4. Kondisi Pendidikan	48
5. Kondisi Sosial dan Ekonomi	50
B. Program Gerakan <i>Njuh Sekolah Maning</i>	52
1. Profil Program Njuh Sekolah Maning	52
2. Sasaran dan Tujuan Program <i>Njuh Sekolah Maning</i>	53
3. Tim Koordinasi Program Njuh Sekolah Maning Kabupaten Pemalang tahun 2021-2023.....	54
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM <i>NJUH SEKOLAH MANING</i> DALAM PENGENTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH	57
A. Tujuan Organisasi	57
B. Keterlibatan Aktor Pelaksana.....	58
C. Prosedur Program	60

1. Sosialisasi	60
2. Pendataan	64
3. Komunikasi dan Koordinasi antara Pelaksana Program dengan Kelompok Sasaran.....	72
4. Pengembalian ATS.....	75
5. Pendampingan ATS.....	86
BAB V DAMPAK PROGRAM <i>NJUH SEKOLAH MANING</i> TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN EKONOMI.....	91
A. DAMPAK PENDIDIKAN	91
1. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah.....	91
2. Peningkatan Angka Partisipasi Murni.....	92
3. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar	94
B. DAMPAK EKONOMI.....	98
1. Peningkatan Sumberdaya	98
2. Peningkatan Ekonomi	99
BAB VI PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk Kecamatan Petarukan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 2 Penduduk Kecamatan Petarukan berdasarkan Pendidikan	48
Tabel 3 Banyak sekolah, guru dan murid di Kecamatan Petarukan	48
Tabel 4 Penduduk Kecamatan Petarukan Berdasarkan Mata Pencaharian	51
Tabel 5 Hasil Pendataan ATS Kecamatan Petarukan Tahun 2022	69
Tabel 6 Faktor Penyebab ATS Belum Pernah Bersekolah	70
Tabel 7 Faktor Penyebab ATS Putus Sekolah	71
Tabel 8 Faktor Penyebab ATS Lulus Tidak Lanjut	71
Tabel 9 Rekap pengembalian Anak Tidak Sekolah di Kecamatan Petarukan Tahun 2022.....	84
Tabel 10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kecamatan Petarukan	91
Tabel 11 Angka Partisipasi Murni (APM) Kecamatan Petarukan	93
Tabel 12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kecamatan Petarukan	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Pemalang	43
Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Petarukan	44
Gambar 3 Sosialisasi Program Njuh Sekolah Maning Kecamatan Petarukan	62
Gambar 4 Pelatihan Pendata dan Pendataan SIPBM ATS.....	66
Gambar 5 Rekonfirmasi Anak Tidak Sekolah	75
Gambar Pelatihan Barista.....	83
Gambar 7 Pelatihan Pengelasan.....	84
Gambar 8 Penerimaan Sertifikasi Barista	100
Gambar 9 Hasil Kopi Pelatihan PKW Barista.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pengentasan anak tidak sekolah telah dilakukan pemerintah dengan berbagai program, program itu bisa terkait program untuk memotivasi atau untuk pengadaan prasarana. Contoh dari upaya untuk pengentasan anak tidak sekolah antara lain seperti Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Poltabes atau Program Pelayanan Anak Tidak Boleh Berhenti Sekolah melalui sekolah filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang, program Tangerang Cerdas Center guna menekan angka anak putus sekolah dan mencegah anak rentan putus sekolah di Kota Tangerang, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah) dan masih banyak lagi. Dengan demikian keprihatinan akan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan akibat kemiskinan sebenarnya telah dilakukan beberapa upaya dengan berbagai program. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya program pengentasan anak tidak sekolah telah dilakukan oleh berbagai pihak.

Upaya pengentasan anak tidak sekolah telah diteliti oleh Sulistriani (2021), upaya pemerintah melalui dinas pendidikan untuk pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri hilir belum benar-benar berhasil dikarenakan oleh beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal. pemerintah daerah sendiri mengeluarkan kebijakan yaitu program wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk bantuan dana beasiswa kepada masyarakat miskin, seperti program PIP (Program Indonesia Pintar), program BSM (Bantuan Siswa Miskin) tetapi kenyataannya bantuan tersebut belum

tepat sasaran, seperti penyalahgunaan uang beasiswa oleh wali murid, sehingga diperlukan evaluasi dari pemerintah tersebut khususnya Dinas Pendidikan.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Tingkat pendidikan yang dienyam masyarakat Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, masih banyak ditemukan anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data Bappeda Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan bahwa Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pemalang berjumlah 34.311 ATS, hal tersebut menyebabkan Kabupaten Pemalang menempati posisi kedua jumlah ATS terbanyak setelah Kabupaten Brebes di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu penyebab tingginya ATS di Kabupaten Pemalang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang dikategorikan sebagai warga miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2021, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah menjadi kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar ke-empat di Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan ATS menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan persoalan ATS yaitu dengan dibentuknya Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 Tahun di Kabupaten Pemalang. Program *Njuh Sekolah Maning* diresmikan pada tanggal 25 Januari 2022. Program ini merupakan salah satu program untuk mengembalikan anak yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah baik formal maupun non formal. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* merupakan sebuah gerakan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan pemangku kepentingan serta Pemerintah Kabupaten Pemalang yang saling bekerja sama untuk menuntaskan ATS dengan cara mengupayakan dan mendukung pengembalian anak usia

sekolah yang tidak bersekolah, melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Program *Njuh Sekolah Maning* didukung oleh Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Pemalang. Adapun maksud dan tujuan Perbup tersebut, yaitu:

1. Rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun adalah untuk penuntasan pendidikan dua belas tahun bagi setiap warga Kabupaten Pemalang
2. Rintisan penuntasan Pendidikan 12 Tahun bertujuan untuk mengumpulkan data anak usia sekolah, mengarahkan, membantu dan memfasilitasi mereka untuk bersekolah bersekolah atau kembali bersekolah setidaknya lulus pendidikan menengah (SMA/ sederajat)
3. Rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun bertujuan untuk meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang

Program *Njuh Sekolah Maning* menyelenggarakan jalur pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yaitu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti SD sampai SMA atau yang sederajat. Sedangkan pendidikan non formal yaitu melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan kesetaraan dalam pembelajaran seperti kejar paket A (setara SD), kejar paket B (setara SMP) dan kejar paket C (setara SMA). Singkatnya program ini menginginkan minimal pendidikan anak-anak belajarnya adalah setingkat SMA ataupun setara dengan Paket C selama 12 tahun SD, SMP, dan SMA.

Sasaran program NSM sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 tahun 2021 pasal 3 ayat 1 sebagai rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun adalah anak yang belum pernah mengikuti pendidikan, anak sekolah yang putus sekolah, dan/atau lulus tidak lanjut. Baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat. ATS yang akan menjadi sasaran program NSM dapat diperoleh dari berbagai

sumber. Pada Peraturan Bupati Pematang Nomor 40 tahun 2021 pasal 13 menyebutkan bahwa sumber untuk memperoleh data ATS dapat diperoleh dari:

1. Satuan Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan atau bentuk lain yang sederajat);
2. Pemerintah desa/kelurahan dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM);
3. Badan Pusat Statistik (BPS)

Program NSM membutuhkan kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan Program NSM mendapat dukungan dari dua kelembagaan Kabupaten Pematang yaitu diranah kebijakan yaitu dengan dibentuknya tim koordinasi Program NSM dan di ranah teknis dengan adanya pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP). Tim koordinasi Program NSM hanya di wilayah kabupaten yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemerintah Kabupaten Pematang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes), Kantor Kementerian Agama, Camat, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU), PD Muhammadiyah, PC LP Ma'arif NU, Dewan Pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan lainnya. KMPP dibentuk dari kabupaten hingga desa. KMPP melibatkan berbagai unsur yang meliputi: lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, forum Corporate Social Responsibility (CSR), dan keterlibatan OPD, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan pemerintahan di level desa. Sebagai pelaksana teknis, KMPP ikut membantu dalam pelaksanaan pendataan ATS, melakukan rekonfirmasi ATS, pengembalian ATS dan pendampingan ATS.

Program *Njuh Sekolah Maning* merupakan program khusus pemerintah daerah sehingga tidak dipungut biaya apapun. Tim koordinasi program *Njuh Sekolah Maning* Kabupaten Pemalang melibatkan lembaga kemanusiaan untuk membantu memberi beasiswa bagi ATS yang kembali bersekolah seperti Bahagia Berbagi Indonesia (BBI), Baznas dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kementerian Agama. Beasiswa tersebut tidak langsung diberikan ke anak tidak sekolah, akan tetapi diberikan kepada lembaga baik dari desa maupun PKBM untuk dikelola anak sehingga tepat sasaran. Kemudian program *Njuh Sekolah Maning* bekerja sama dengan Bank Jateng memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sudah belajar di PKBM umur 17 tahun ke atas untuk pendidikan keterampilan dan dilatih di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdekat sesuai dengan kebutuhan anaknya seperti keterampilan di bidang mesin, menjahit, dan lain-lain selama 3 bulan. Kemudian program ini bekerja sama dengan dunia usaha, setelah anak lulus dari PKBM kemudian anak tersebut memiliki pendidikan keterampilan bersertifikat yang dapat digunakan untuk bekerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Upaya pengentasan ATS melalui program NSM melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tim koordinasi program NSM melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi sangat penting, tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait program NSM. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk membujuk ATS agar mau kembali sekolah melalui program NSM. *Kedua*, pemerintah bersama tim koordinasi program NSM akan membentuk tim pendata dan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) di setiap desa dengan langkah awal untuk mendata ATS. Ketika sudah terbentuk tim pendata, kemudian tim pendata akan melakukan pelatihan pendataan menggunakan pelatihan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).

Pelatihan pendataan bertujuan untuk melatih para pendata di masing-masing desa tentang bagaimana proses pendataan sampai dengan pelaporannya dan mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah. Dengan

pelatihan tersebut harapannya mereka sudah siap untuk diterjunkan ke masyarakat dengan bekal kemampuan yang sudah mereka miliki guna melakukan pendataan terhadap anak tidak sekolah di desa mereka masing masing. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menyediakan anggaran untuk pelatihan dan pendataan ATS, anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah pelatihan pendataan, kemudian tim melakukan pendataan ATS. Ketika data sudah didapatkan tim, maka dilakukan rekonfirmasi data ATS.

Ketiga, komunikasi antara pelaksana program dengan kelompok sasaran dengan cara rekonfirmasi data. Proses rekonfirmasi data ATS dilakukan dengan *door to door* yaitu menanyakan kembali terkait kesanggupannya untuk kembali bersekolah. Selain itu, pada saat melakukan rekonfirmasi data, tim pendata juga memberikan sosialisasi tentang Program *Njuh Sekolah Maning* dan memberikan motivasi kepada ATS dan keluarganya agar mau bersekolah kembali. Setelah data terkonfirmasi, kemudian upaya *keempat* yang dilakukan adalah kolaborasi bersama untuk mengembalikan ATS, sehingga ATS bisa melanjutkan sekolah baik formal maupun non formal.

Kelima, untuk memastikan anak yang sudah kembali bersekolah pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melakukan pendampingan ATS sebagai upaya memantau terus agar anak tersebut tidak keluar lagi, melalui Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) yang bekerja sama dengan pihak sekolah atau PKBM serta instansi terkait seperti dinas pendidikan. Program ini pada tahun 2021 mereplikasikan ke 5 desa, kemudian pada tahun 2022 akan mengawali dengan memprioritaskan lima kecamatan yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem yaitu Kecamatan Petarukan, Watukumpul, Bantarbolang, Belik dan Moga yang perkecamatannya diambil 5 desa sehingga dari 5 kecamatan terdapat 25 desa, dan pada tahun 2023 program ini akan menerapkan pada 194 desa.

Studi ini tertuju pada Kecamatan Petarukan yang mana saat ini Kecamatan Petarukan mereplikasikan ke 5 desa yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem yaitu Desa Pegundan, Klareyan, Panjunan, Serang dan Kalirandu. Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2022 menunjukkan bahwa keseluruhan jumlah anak tidak sekolah Desa replikasi di Kecamatan Petarukan berjumlah 354 anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PIC program *Njuh Sekolah Maning*, keberhasilan penanganan anak tidak sekolah di Kecamatan Petarukan terbilang paling berhasil dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Pemerintah Kecamatan Petarukan, kepala desa dan *stakeholder* berpartisipasi langsung dan mendukung program *Njuh Sekolah Maning* serta akan membantu memantau terus perkembangan data ATS sampai proses kembali bersekolah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, tampaknya masyarakat belum merespon dengan baik program tersebut, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana program itu berjalan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Pengentasan Anak Tidak Sekolah di Tengah Kemiskinan Studi pada Program *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program *Njuh Sekolah Maning* dalam pengentasan anak tidak sekolah?
2. Bagaimana dampak Program *Njuh Sekolah Maning* terhadap peningkatan pendidikan dan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program *Njuh Sekolah Maning* dalam pengentasan anak tidak sekolah
2. Untuk mengetahui dampak Program *Njuh Sekolah Maning* terhadap peningkatan pendidikan dan ekonomi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kajian sosiologi terutama tentang peran sebuah program sebagai upaya pengentasan anak tidak sekolah di suatu wilayah serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak berperan dalam penyelenggaraan Program *Njuh Sekolah Maning* dan akan terus memposisikan diri sebagai mitra masyarakat yang akan memfasilitasi inisiatif dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi orang tua, supaya bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya yang putus sekolah melalui Program *Njuh Sekolah Maning*
- c. Bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat memotivasi diri untuk lebih semangat dalam meningkatkan minat belajar.
- d. Bagi peneliti, dilaksanakannya penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti sendiri yakni menambah wawasan dan

informasi, serta menjadi motivasi untuk lebih memperhatikan situasi di bidang pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Upaya Pengentasan Anak Tidak Sekolah

Kajian mengenai upaya pengentasan ATS sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, diantaranya oleh Mustari (2022), Wahyuni (2022) dan Putra (2021), dan Rohmaniah (2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustari (2022), menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi anak putus sekolah antara lain: Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kebijakan di bidang pendidikan yaitu Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang wajib belajar 12 tahun, dan sosialisasi di masyarakat dengan dua cara yaitu satu desa sekaligus dan mengunjungi dusun-dusun yang ada. Kemudian hasil riset Wahyuni (2022), diketahui bahwa peran pemerintah Nagari dalam mengatasi anak putus sekolah sebagai berikut: a) terselenggaranya pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan b) penguatan pendidikan nonformal di rumah c) memberikan bantuan pada peserta didik yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pada penelitian Putra, dkk (2021), memperoleh hasil bahwa upaya dan peran Dinas Pendidikan untuk mengurangi angka anak putus sekolah di Kabupaten Bintan Kecamatan Gunung Kijang antara lain menetapkan kebijakan pendidikan, mendukung pembiayaan pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada penduduk miskin, sosialisasi kepada warga serta program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Berbeda pada penelitian Rohmaniah (2019), memperoleh hasil bahwa Upaya yang dilakukan meliputi: a) perencanaan dan pelaksanaan merupakan bentuk pengelolaan yang dilakukan di komunitas qaryah thayyibah. (2) melalui pendidikan

akhlaq yaitu perencanaan dan pembinaan peserta didik sebagai upaya membina anak putus sekolah.

Berbeda dengan penelitian tersebut di atas, penelitian ini lebih memfokuskan upaya pengentasan anak tidak sekolah melalui Program *Njuh Sekolah Maning* .

2. Anak Tidak Sekolah

Studi mengenai Anak Tidak Sekolah sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya oleh Ranti (2019), Larasati (2019), dan Uriyalita (2020)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ranti (2019), memperoleh hasil bahwa 1) faktor penyebab anak tidak sekolah diantaranya: kurangnya perhatian orang tua, kemampuan siswa rendah, hamil diluar nikah dan faktor ekonomi adalah penyebab anak putus sekolah, 2) putus sekolah berakibat kepada anak itu sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat, 3) tindakan pencegahan meliputi sosialisasi, beasiswa, kunjungan mandiri dan kontrol akses sekolah. Pada penelitian Larasati (2019), diperoleh hasil bahwa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Rumpin Bogor ialah keadaan orang tua yang kurang mampu membiayai pendidikan anaknya serta pola berpikir orang tua yang tidak mengetahui pentingnya pendidikan untuk masa depan, jarak dari tempat tinggal sekolah terpencil dan akses ke sekolah dan transportasi jalan yang tidak memadai. Sedangkan hasil penelitian Uriyalita (2020) ditemukan bahwa faktor penyebab anak tidak sekolah ialah rendahnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan, ekonomi, doktrin pemimpin kharitsmatik, sampai dengan kasus perundungan antarsiswa yang ditemukan di sana.

Berbeda dengan penelitian tersebut di atas penelitian ini nantinya akan lebih memfokuskan implementasi program *Njuh Sekolah Maning* sebagai pengentasan anak tidak sekolah.

3. Kemiskinan

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, diantaranya Karini (2018), Kharisma (2021), dan Rahmahan (2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Karini (2018), memperoleh hasil bahwa semakin tinggi angka partisipasi sekolah, maka semakin baik pula perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bangkabelitung. Kemudian pada penelitian Kharisma (2020) memaparkan hasil bahwa peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menunjukkan dari segi pendidikan masyarakat miskin yang menerima bantuan PKH dapat meningkatkan pendidikan bagi anak-anaknya, dan dari segi pendapatan masyarakat miskin penerima PKH sudah mulai mengalami peningkatan perekonomiannya. Sedangkan pada penelitian Rahmahan (2022) diperoleh hasil bahwa efektivitas program sekolah filial dalam mengurangi angka putus sekolah akibat kemiskinan di Palembang efektif dengan rata rata 78,40%.

Berbeda dengan penelitian tersebut di atas penelitian ini lebih memfokuskan dampak program *Njuh Sekolah Maning* terhadap peningkatan pendidikan.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Upaya Pengentasan Anak Tidak Sekolah

Definisi upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha, ikhtiar (mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, mencari jalan keluar dan berjuang). Poerwadarminta menyatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud akal dan ikhtiar. Upaya adalah suatu perjuangan, ikhtiar atau usaha untuk mencapai suatu tujuan untuk memecahkan suatu masalah, mencari jalan keluar (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengentasan ialah cara, proses, perbuatan mengentas atau mengentaskan.

Sehingga dapat disimpulkan menurut penulis, upaya pengentasan anak tidak sekolah adalah sebuah usaha dan cara atau tindakan yang dimaksudkan untuk mengentaskan anak tidak sekolah dengan cara mengembalikan anak tidak sekolah untuk bersekolah kembali baik formal maupun nonformal.

b. Anak Tidak Sekolah

Anak tidak sekolah adalah anak dan remaja usia wajib sekolah antara 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun menurut jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat yang tidak terdaftar pada satuan pendidikan. Anak Tidak Sekolah dikategorikan sebagai anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak bersekolah karena faktor internal maupun faktor eksternal seperti faktor ekonomi, sosial, kesehatan.

Anak Tidak Sekolah dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: 1) anak belum pernah sekolah, adalah usia wajib sekolah yang berusia antara 7-18 tahun serta belum pernah menjadi peserta didik di

SD atau anak belum pernah sama sekali bersekolah, 2) anak putus sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Atau dapat didefinisikan sebagai seorang anak yang keluar pada suatu jenjang pendidikan sebelum mereka menamatkan pendidikannya sesuai jenjang waktu sistem persekolahan yang sedang ditempuh, 3) anak lulus tetapi tidak lanjut, artinya anak sudah lulus pada suatu jenjang pendidikan akan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Anak tidak sekolah menjadi persoalan serius karena ironis dengan upaya pemerintah yang ingin memajukan pendidikan. (Peraturan Bupati Pematang, 2021)

c. Kemiskinan

Menurut Prof. Dr. Emil Salim kemiskinan berarti tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk hidup. Kemiskinan berarti keadaan tidak memiliki cukup uang untuk hidup seperti kebanyakan orang di sekitar dan tidak mampu menggunakan tenaga mental dan tubuh untuk membantu diri sendiri.

Bank Dunia (2004) secara operasional mendefinisikan kemiskinan berarti tidak memiliki cukup makanan, tempat tinggal yang aman, atau tidak bisa pergi ke dokter saat sakit serta tidak bisa bersekolah, kesulitan mencari pekerjaan, tidak memiliki akses ke air bersih, dan merasa tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan penting. Sedangkan di Indonesia, ketika berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan hidup, seperti makanan dan hal-hal penting lainnya. Pemerintah memiliki cara untuk mengukur kemiskinan dengan melihat berapa banyak makanan yang dimiliki masyarakat dan apakah mereka

memiliki cukup barang lain yang mereka butuhkan juga.(Astutik, 2019).

Secara teoritis kemiskinan berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua kategori berikut:

- 1) Kemiskinan natural atau alamiah, yaitu beberapa orang tidak memiliki cukup barang yang mereka butuhkan karena mereka tinggal di tempat yang tidak memiliki banyak sumber daya atau hal-hal seperti teknologi untuk membantu mereka.
- 2) Kemiskinan struktural, yaitu terjadi ketika beberapa orang tidak memiliki sumber daya dan kesempatan yang sama seperti orang lain karena cara pengaturan dalam masyarakat, beberapa orang tetap miskin karena mereka tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut.

d. Program *Njuh Sekolah Maning*

Njuh Sekolah Maning berasal dari Bahasa Jawa yang terdiri dari tiga kata, yaitu *njuh* yang berarti ayo, sekolah berarti sekolah dan *maning* artinya kembali. Sehingga *Njuh Sekolah Maning* artinya ayo sekolah kembali. Program *Njuh Sekolah Maning* merupakan sebuah program yang mengajak ATS agar kembali bersekolah baik formal maupun non formal.

e. Pendidikan Menurut Perspektif Islam

Pendidikan di dalam Islam sangat penting. Islam sebagai agama Rahmatan Lill'amin mewajibkan kita semua untuk mencari ilmu melalui pendidikan baik di dalam maupun di luar pendidikan formal. Allah juga memulai wahyu Al-Qur'an yang pertama dengan sebuah ayat yang memerintahkan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan membaca karena membaca merupakan salah satu wujud kegiatan belajar dalam pendidikan. Dan secara luas, melalui pembelajaran orang dapat mengembangkan pengetahuan dan sekaligus

meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan belajar sangat penting, karena itu di dalam Al-Qur'an Allah berjanji dalam QS Al Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...

Artinya: ... "niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat..." (Q.S Al-Mujadalah : 11)

Kegiatan pendidikan dalam garis besarnya dapat dibagi tiga: 1) dari diri kita sendiri, 2) dari hal-hal di sekitar kita, dan 3) dari orang lain yang mengajari kita berbagai hal. Ketika kita berbicara tentang belajar, ada tiga bagian penting: merawat tubuh kita, menggunakan otak kita untuk berpikir, dan bersikap baik dan baik hati. Kita bisa belajar di tiga tempat: di rumah, di lingkungan sekitar, dan di sekolah.

Dalam perspektif Islam, pendidikan dikenal dengan beberapa istilah, yaitu: Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib. Menurut Naquib al-Attas dalam bukunya (1984:52), istilah *ta'dib* adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan, sementara istilah *tarbiyyah* terlalu luas karena Pendidikan dalam islam ini mencakupi juga Pendidikan untuk hewan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa istilah *ta'dib* merupakan *masdar* kata kerja *addaba* yang berarti Pendidikan. Dari kata *addaba* ini diturunkan juga kata *addabun*. Menurut al-Attas, *addabun* berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual maupun rohaniah seseorang

Menurut Zuhairini, pendidikan Islam adalah usaha berupa bimbingan kearah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Zuhairini, 1995). Sedangkan Zakiah Dardjat merumuskan Pendidikan Islam sebagai berikut: a) Pendidikan Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam, serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*Way of life*). b) Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. c) Pendidikan Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik, agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diyakini menyeluruh, serta menjadikan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak (Zakiah, 1992).

Pendidikan itu harus membentuk usaha sistematis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa dengan berbagai aspeknya baik ranah *kognitif*, *afektif* dan *psikomotori* sehingga tujuan akhirnya adalah kesempurnaan hidup. Adapun pendidikan Islam adalah usaha sadar secara sistematis yang memandu proses dan penyesuaian individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.

Pengertian pendidikan Islam adalah: “Proses perubahan dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman di kalangan peserta didik melalui pertumbuhan dan perkembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Berdasarkan beberapa definisi mengenai pendidikan Islam, dalam teori-teori pendidikan Islam sekurang-kurangnya haruslah

mendiskusikan hal-hal berikut: tujuan, pendidik, siswa, materi, metode, alat dan evaluasi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita lihat bahwa pendidikan Islam merupakan proses pembinaan pengembangan diri. Proses ini melibatkan aspek akal, jasmani, dan hati serta menumbuhkan kembangkan kepribadian Islami melalui transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islami, supaya manusia dapat hidup sebagaimana mestinya untuk menjalankan tugasnya di muka bumi dalam beribadah dan sebagai seorang khalifah. (Hidayat, 2018). Pendidikan islam menurut penulis adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam.

2. Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory*) Anthony Oberschall

Teori mobilisasi sumber daya (*Resource Mobilization Theory*) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Anthony Oberschall yang meneliti bagaimana gerakan sosial dapat muncul dan berhasil dengan proses-proses sosial yang dilakukannya (Sukmana, 2016). Mobilisasi (*mobilization*) sendiri mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif (Oberschall, dalam Locher, 2002). Gerakan sosial dalam kacamata teori mobilisasi sumber daya justru melihat bahwa perilaku kolektif dilakukan dengan mobilisasi pergerakan yang terorganisir, dan pembentukan organisasi sebagai wadah gerakan justru diperlukan untuk memelihara tujuan yang ingin dicapai serta pergerakan berlangsung berkelanjutan. Teori Mobilisasi Sumberdaya berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial (Sukmana, 2016).

Faktor determinan dalam melihat kemunculan dan keberhasilan dari oleh Oberschall meliputi (1) Organisasi gerakan sosial; (2) Pemimpin dan kepemimpinan; (3) Sumber daya dan mobilisasi sumber daya; (4) Jaringan dan partisipasi, dan ; (5) Peluang dan kapasitas masyarakat

Penjelasan faktor-faktor determinan dalam suatu Gerakan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Gerakan sosial

McLaughlin menyatakan bahwa karakteristik yang menonjol dari suatu Gerakan sosial adalah meliputi adanya system nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan, dan struktur organisasi. Selanjutnya Killian (Della Porta dan Diani, 2006: 140), berdasarkan hasil studinya tentang struktur peranan, posisi, dan norma diantara partisipan Gerakan sosial, berkesimpulan bahwa karakteristik penting dalam suatu Gerakan sosial adalah organisasi.

b. Pemimpin dan kepemimpinan

Menurut Morris dan Staggenborg, para pemimpin (*leaders*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan- kesempatan, menyusun strategi, membingkai tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil.

c. Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya

Pertama, sumberdaya moral (*moral resourch*). Sumberdaya moral meliputi legitimasi atau hak kekuasaan, dukungan simpati, dan dukungan orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal. *Kedua*, sumberdaya kultural (*cultural resourch*) tersedia secara luas, kurang eksklusif, dan dapat diakses untuk digunakan secara bebas dari penilaian

menguntungkan dari orang-orang di luar gerakan atau organisasi gerakan sosial. Kategori sumberdaya kultural ini meliputi produksi gerakan atau isu-isu penting seperti music (*music*), literatur (*literature*), majalah (*magazine*), koran (*newspaper*), dan film dan video (*films and videos*).

Ketiga, sumberdaya organisasi sosial. Kategori sumberdaya ini meliputi baik organisasi sosial yang disengaja (*intentional social organization*) dan sepadan (*appropriable*). *Keempat*, sumberdaya manusia (*human resources*). Kategori sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti: tenaga kerja, pengamanan, keterampilan, dan keahlian. *Kelima*, sumberdaya material (*material resources*). Kategori dari sumberdaya material mengombinasikan apa yang dalam bahasa ekonomi disebut dengan modal fisik dan finansial meliputi sumber-sumber: moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan pembekalan.

d. Jaringan dan partisipasi

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu Gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kolektifitas dari orang-orang yang terlibat dalam upaya menciptakan atau menolak perubahan sosial.

e. Peluang dan kapasitas masyarakat.

Perspektif teoritik yang dijadikan dasar analisis meliputi: 1) perspektif teori gerakan sosial yang mengacu pada mobilisasi sumberdaya, 2) perspektif teori organisasi formal yang mengacu pada lingkungan organisasi. Kedua perspektif ini menekankan bahwa kemampuan masyarakat untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif tergantung atas sumberdaya, yang utama adalah personel dan dana

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Jenis penelitian lapangan yang dipilih berdasarkan alasan penelitian masalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah menggambarkan data yang diperoleh selama penelitian sebagai kesimpulan dari penelitian itu. Menggunakan pendekatan naratif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menyajikan semua data dengan akurat, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang sangat relevan dengan situasi yang di lapangan. (Sugiyono, 2013).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi dan data yang digunakan dalam penelitian. Data primer dan data sekunder merupakan kumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (subyek penelitian) oleh peneliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan informan dan hasil observasi. Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan *Person In Charge* (PIC) Program *Njuh Sekolah Maning*, Camat Petarukan dan tim pendata desa. Untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan observasi lebih mendalam untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memang valid.
- b. Data Sekunder ialah data yang sudah ada serta dikumpulkan pihak lain, dan telah terdokumentasikan sehingga selanjutnya peneliti tinggal menyalin dan mengolahnya untuk tujuan penelitiannya. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh melalui dokumen dari subjek penelitian atau melalui orang lain (Sugiyono, 2013). Data sekunder

berupa laporan ataupun dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari foto, dokumen, data dan penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti (Rubiyanto, 2011). Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif, artinya penulis di sini tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan observasi atau hanya mengamati dari kejauhan. Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan secara langsung mengenai peran dan aktivitas yang dilakukan Program *Njuh Sekolah Maning* sebagai upaya pengentasan anak tidak sekolah di Kecamatan Petarukan dan melakukan observasi terhadap dampak yang diberikan Program *Njuh Sekolah Maning* terhadap peningkatan pendidikan anak tidak sekolah atau aktivitas lain terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang. Percakapan dilakukan oleh dua kelompok, yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai (*interviewee*), yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan teknik bola salju. Teknik bola salju (*snowball*) adalah teknik penentuan informan yang awalnya kecil kemudian bertambah besar. Proses menentukan informan dilakukan dengan cara menggali informasi yang relevan dengan penelitian

berdasarkan informan sebelumnya tanpa mengetahui berapa banyak orang yang terlibat, sehingga jumlah informan semakin banyak sampai mengalami kejenuhan data. Kriteria dalam menentukan informan utama yaitu PIC Program *Njuh Sekolah Maning* sebagai sekretaris tim koordinasi program Njuh Sekolah Maning, selanjutnya informan kunci yaitu Camat Petarukan sebagai koordinator wilayah kecamatan dan kriteria yang dilakukan oleh peneliti dalam menentukan informan pendukung yaitu tim pendata desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tindakan mengumpulkan data melalui pencarian dokumen (Widodo, 2017). Teknik ini dilakukan dengan menggunakan gambar, dokumen atau objek lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mendokumentasikan data yang dapat diperoleh dari kantor BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya yang juga sebagai kantor sekretariat Program *Njuh Sekolah Maning* dan perpustakaan sebagai referensi untuk mendukung data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah sebuah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan menghasilkan kesimpulan tentang apa yang penting sehingga menjadi lebih mudah bagi diri sendiri dan orang lain untuk memahaminya. Pada penelitian ini Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis data induktif. Analisis data induktif adalah analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Sidiq, 2019).

Proses atau teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan, klasifikasi dan identifikasi. Selain itu peneliti juga melakukan interpretasi data dengan mengacu pada referensi teoritis yang berkaitan atau relevan dengan masalah penelitian. Analisis data meliputi reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang lebih utama, memfokuskan di hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah reduksi data, kemudian selanjutnya penyajian data, yang dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Suatu penemuan bisa berbentuk gambaran ataupun penjelasan tentang sesuatu yang pada awalnya gelap atau tidak diketahui, kemudian ketika dilakukan penelitian menjadi jelas, bisa berbentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sidiq, 2019).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan untuk menulis karya ini dibagi menjadi enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI MOBILISASI SUMBER DAYA (RESEARCH MOBILIZATION THEORY)

Bab ini berisi Teori Mobilisasi Sumber Daya (Resourch Mobilization Theory) Anthony Oberschall yang meliputi konsep, asumsi dasar, dan istilah-istilah

kunci dan Kontekstualisasi Teori Mobilisasi Sumber Daya dalam Program *Njuh Sekolah Maning*

BAB III: PROFIL KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG DAN PROGRAM *NJUH SEKOLAH MANING*

Bab ini berisi penjelasan kondisi dan wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dari aspek gambaran umum berupa kondisi geografis, kondisi demografi berupa kependudukan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi dan Program *Njuh Sekolah Maning*

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM *NJUH SEKOLAH MANING* DALAM PENGENTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Bab ini berisi mengenai implementasi program *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan Petarukan. Bagaimana upaya atau tahapan yang dilakukan program ini sampai anak tidak sekolah bisa kembali bersekolah baik formal maupun non formal.

BAB V DAMPAK PROGRAM *NJUH SEKOLAH MANING* TERHADAP PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Bab ini membahas dampak yang diberikan Program *Njuh Sekolah Maning* terhadap pendidikan dan peningkatan ekonomi di Kecamatan Petarukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TEORI MOBILISASI SUMBERDAYA

(RESOURCE MOBILIZATION THEORY)

Pada bab ini peneliti akan membahas terkait teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) yang diperkenalkan oleh Anthony Oberschall yang meneliti bagaimana gerakan sosial dapat muncul dan berhasil dengan proses-proses sosial yang dilakukannya. Mobilisasi (*mobilization*) sendiri mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Teori mobilisasi sumberdaya berasumsi bahwa jika ada ketidakpuasan yang terjadi, hal tersebut memungkinkan gerakan sosial muncul, dalam bab ini peneliti mengkategorikan dua sub-bab yaitu definisi konseptual dan kerangka teori.

A. Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) Anthony Oberschall

1. Konsep Dasar Teori Mobilisasi Sumberdaya

Teori mobilisasi sumber daya (*Resource Mobilization Theory*) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Anthony Oberschall yang meneliti bagaimana gerakan sosial dapat muncul dan berhasil dengan proses-proses sosial yang dilakukannya (Sukmana, 2016). Mobilisasi (*mobilization*) sendiri mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Gerakan sosial dalam kacamata teori mobilisasi sumber daya justru melihat bahwa perilaku kolektif dilakukan dengan mobilisasi pergerakan yang terorganisir, dan pembentukan organisasi sebagai wadah gerakan justru diperlukan untuk memelihara tujuan yang ingin dicapai serta pergerakan berlangsung berkelanjutan.

Teori Mobilisasi Sumberdaya menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumberdaya (*the availibility of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Sejalan dengan pandangan Klandermans, selanjutnya Waterman (Pichardo, 1988: 98) menyatakan bahwa mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) pada dasarnya suatu teori yang mengkaji rasionalitas dari perilaku gerakan sosial. Menurut Fireman dan Gamson (Pichardo, 1988: 98), esensi dari teori mobilisasi sumberdaya adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial.

Oberschall, McCarthy, Zald, Gamson, dan Tilly (Pichardo, 1988: 98) mengkaji berbagai elemen yang diperlukan dalam suatu gerakan dan bagaimana proses dari elemen-elemen ini, khususnya sumberdaya, dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan. Pendekatan ini mengonsentrasikan pada isolasi dan pemahaman atas kekuatan-kekuatan yang berkontribusi terhadap munculnya gerakan sosial, khususnya persyaratan fisik dan lingkungan yang dapat memengaruhi perkembangan dan perilaku gerakan. Konsep ini merupakan dasar bagi lahirnya teori mobilisasi sumberdaya tentang gerakan sosial. Menurut Halebsky (Pichardo, 1988: 98), teori mobilisasi sumberdaya menyamakan antara perilaku gerakan sosial (*social movemen behavior*) dengan perilaku politik (*political behavior*). Secara umum, model ini berpandangan bahwa keberadaan struktur pemerintah menentukan akses kelompok terhadap sumberdaya masyarakat.

Atas dasar berbagai kajian tentang basis rasionalitas partisipasi dalam tindakan kolektif, kemudian Pichardo (1988: 100) melihat bahwa terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumberdaya tentang

terjadinya suatu gerakan sosial, yakni: sumberdaya (*resources*), motivasi (*motivation*), dan lingkungan politik (*political environment*).

2. Asumsi Dasar Teori Mobilisasi Sumberdaya

Resource Mobilization Theory berasumsi bahwa apabila dalam suatu masyarakat muncul ketidakpuasan maka memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Setiap gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non material seperti wewenang (*authority*) komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*) dan sebagainya. Menurut Oberschall (Locher, 2002: 260), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (*opponents*).

Menurut Oberschall (Locher, 2002: 259), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif (Sukmana, 2016). Kelompok lebih mudah untuk melakukan mobilisasi karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan (*established*), terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi tradisional dari para anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagai kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi gerakan sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur

masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil (McCarthy & Zald, dalam Locher, 2002: 261).

3. Istilah Kunci Teori Mobilisasi Sumberdaya

Teori mobilisasi sumber daya memiliki tiga fokus dalam melihat kemunculan dan keberhasilan gerakan sosial, yaitu ketersediaan sumber daya, peluang politik, serta mobilisasi dari hal tersebut. Faktor determinan dalam melihat kemunculan dan keberhasilan oleh Oberschall meliputi (1) Organisasi gerakan sosial; (2) Pemimpin dan kepemimpinan; (3) Sumber daya dan mobilisasi sumber daya; (4) Jaringan dan partisipasi, dan ; (5) Peluang dan kapasitas masyarakat

Penjelasan faktor-faktor determinan dalam suatu Gerakan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Gerakan Sosial

Organisasi gerakan sosial, sebagaimana teori mobilisasi sumber daya muncul sebagai faktor penentu yang penting dimana pembentukan organisasi tersebut inilah yang menjadi roda penggerak utama dalam memobilisasi bahkan mengumpulkan sumber daya untuk melakukan sebuah tujuan tertentu dalam cakupan ini ialah gerakan sosial itu sendiri. McLaughlin menyatakan bahwa karakteristik yang paling terlihat dari suatu gerakan sosial adalah adanya sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan, dan struktur organisasi. Berdasarkan hasil studi Porta dan Diani (2006) tentang struktur peranan, posisi, dan norma diantara partisipan Gerakan sosial, berkesimpulan bahwa karakteristik penting dalam suatu Gerakan sosial adalah organisasi.

Selanjutnya McCarthy dan Zald (Della Porta dan Diani, 2006: 140) menyatakan baha organisasi gerakan sosial adalah

suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Menurut Porta dan Diani (2006: 140), secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, dengan tujuan mencapai tujuan mereka yang diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial (social movement) atau kontra gerakan sosial.

Arnold dan Feldman (1986:5) menyebutkan bahwa karakteristik dari semua tipe organisasi ditandai oleh tiga faktor, yaitu: 1) organisasi terdiri dari individu-individu dan kelompok; 2) organisasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan; dan 3) organisasi agar bisa mencapai tujuannya maka menerapkan koordinasi dan spesialisasi. Sementara Chaskin, Brown, Venkatesh, dan Vidal (2001 : 63-65) menyatakan bahwa peran yang bisa dimainkan oleh suatu organisasi dalam masyarakat adalah meliputi: 1) memproduksi pelayanan-pelayanan dan barang-barang yang dibutuhkan; 2) menyediakan akses terhadap sumberdaya dan kesempatan; 3) perantara atas sumberdaya eksternal; 4) membantu pengembangan sumberdaya manusia; 5) menciptakan atau memperkuat identitas dan komitmen dalam masyarakat; dan 6) mendukung advokasi masyarakat dan pengerahan kekuatan

b. Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin gerakan (*leaders movement*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan- kesempatan, menyusun strategi, membingkai

tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial. Pemimpin (*leaders*) dalam suatu organisasi gerakan sosial memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial. Pemimpin biasanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal status dan wewenang, kadang-kadang juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu organisasi gerakan sosial.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan (Robbins, 1988: 117). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi (*influence process*), dimana dalam kepemimpinan melibatkan upaya pemimpin (*leader*) untuk mempengaruhi perilaku satu atau beberapa orang lainnya. Selanjutnya, Arnold dan Feldman (1986: 120-121) menyebutkan ada lima sumber kekuasaan dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, yaitu: (1) *reward power*, yakni kemampuan pemimpin untuk memberikan ganjaran/hadiah kepada para pengikut; (2) *coercive power*, yakni mengacu kepada kemampuan pemimpin untuk memberikan tekanan atau hukuman terhadap para pengikut; (3) *legitimate power*, yakni mengacu kepada kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari kedudukan atau peran dalam kelompok/organisasi; (4) *expert power*, yakni kekuasaan yang diperoleh seorang pemimpin karena pengetahuan atau keahliannya atas tugas-tugas yang berkaitan dengan bawahannya; dan (5) *referent power*, yakni kekuasaan

yang dimiliki seorang pemimpin tergantung atas sejauhmana bawahan mengidentifikasi dan ingin meniru pemimpinnya. *Referent power* secara penuh tergantung pada sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik yang ada pada diri seorang pemimpin.

Fungsi pemimpin (*leader*) dalam suatu gerakan, yakni sebagai mobilisator (*mobilizer*), menginspirasi partisipan (*inspiring participants*), dan di luar gerakan pemimpin berfungsi sebagai artikulator yang menghubungkan antara gerakan dengan masyarakat luas. Meskipun demikian, karena kompleksitas dari gerakan, maka fungsi dan peran pemimpin dalam gerakan juga bisa bervariasi.

c. Sumber daya dan Mobilisasi Sumber Daya

Sumber daya dan mobilisasi sumber daya menjadi faktor determinan selanjutnya dan dapat dikatakan sebagai penentu kegagalan atau keberhasilan gerakan sosial yang ada. Terdapat 5 tipe sumber daya (*resources*) yang dimiliki gerakan sosial menurut Edwards & McCarthy (Sukmana, 2016), yaitu sumber daya moral (*moral resources*), sumber daya kultural (*cultural resources*), sumber daya organisasi sosial (*social-organizational resources*), sumber daya manusia (*human resources*), dan sumber daya material (*material resources*).

Pertama, sumberdaya moral (*moral resourch*). Sumberdaya moral (*moral resources*) meliputi legitimasi atau hak kekuasaan (*legitimacy*), dukungan solidaritas (*solidarity support*), dukungan simpati (*sympathetic support*), dan dukungan orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal (*celebrity*). *Kedua*, sumberdaya kultural (*cultural resourch*) tersedia secara luas, kurang eksklusif, dan dapat diakses untuk digunakan secara

bebas dari penilaian menguntungkan dari orang-orang di luar gerakan atau organisasi gerakan sosial. Kategori sumberdaya kultural ini meliputi produksi gerakan atau isu-isu penting seperti music (*music*), literatur (*literature*), majalah (*magazine*), koran (*newspaper*), dan film dan video (*films and videos*).

Ketiga, sumberdaya organisasi sosial. Kategori sumberdaya ini meliputi baik organisasi sosial yang disengaja (*intentional social organization*) dan sepadan (*appropriable*). Organisasi sosial yang disengaja (*intentional social organization*) adalah organisasi yang dibentuk secara khusus untuk tujuan gerakan sosial lebih lanjut. Kebalikannya, organisasi sosial sepadan (*appropriable social organization*) dibentuk bukan untuk tujuan gerakan (*nonmovement purposes*), akan tetapi aktor-aktor gerakan memungkinkan untuk mendapatkan akses sumberdaya melalui organisasi ini. Terdapat tiga bentuk dari sumberdaya organisasi sosial, yakni: infrastruktur (*infrastructures*), jaringan sosial (*social network*), dan organisasi (*organizations*). Secara jelas, ketiga bentuk ini berbeda dalam formalitas organisasi, tapi kami menekankan sejauhmana akses kepada mereka dapat dikendalikan, atau dengan kata lain bagaimana mereka memilikinya. Infrastruktur adalah organisasi sosial setara dengan barang publik seperti layanan pos (*postal service*), sanitasi (*sanitation*), atau infrastruktur sipil (*civil infrastructures*) seperti jalan (*roads*), trotoar (*sidewalks*), dan lampu lalu lintas (*traffic lights*), yang memfasilitasi kelancaran fungsi kehidupan sehari-hari. Infrastruktur bukan milik sumberdaya sosial (*social resources*). Sebaliknya, akses terhadap jaringan sosial (*social networks*) dan

kelompok dan organisasi formal khusus, maka sumberdaya yang ada di dalamnya dapat dikontrol (dikendalikan).

Keempat, sumberdaya manusia (*human resources*). Sumberdaya manusia lebih nyata (*tangible*) dan lebih mudah untuk diapresiasi dibandingkan dengan tiga sumberdaya sebelumnya yaitu: sumberdaya moral (*moral resources*), sumberdaya kultural (*cultural resources*), dan sumberdaya organisasi sosial (*social organizational resources*). Kategori sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti: tenaga kerja (*labor*), pengamanaan (*experience*), keterampilan (*skills*), dan keahlian (*expertise*). Dalam kategori ini juga termasuk kepemimpinan. Sumberdaya manusia dalam hal ini lebih bersifat individual daripada struktur organisasi sosial atau kultural. Individu biasanya memiliki hak untuk mengontrol penggunaan sumberdaya manusia dan tenaga kerja, kecuali dalam kasus ekstrim seperti kerja paksa (*force labor*) dan pemerasan (*extortion*).

Kelima, sumberdaya material (*material resources*). Kategori dari sumberdaya material mengombinasikan apa yang dalam bahasa ekonomi disebut dengan modal fisik dan finansial (*financial and physical capital*), meliputi sumber-sumber: moneter (*monetary*), hak milik (*property*), ruang kantor (*office space*), peralatan (*equipments*), dan perbekalan (*supplies*). Sumberdaya moneter/keuangan (*monetary*) telah mendapat perhatian yang besar. Uang adalah sangat dibutuhkan dan penting. Tidak peduli berapa banyak sumberdaya lainnya tentang mobilisasi gerakan, itu akan dikenakan biaya dan seseorang harus membayarnya. Sumberdaya material juga mendapat perhatian analisis karena mereka secara umum lebih

nyata (*tangible*), lebih eksklusif (*more proprietary*), dan dalam beberapa kasus uang lebih fungsional (*more fungible*) dibandingkan dengan tipe dari sumberdaya yang lainnya.

d. Jaringan dan Partisipasi

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kolektifitas dari orang-orang yang terlibat dalam upaya menciptakan atau menolak perubahan sosial. Keberhasilan suatu organisasi gerakan sosial dikaitkan dengan sejauh mana jaringan dan partisipasi seseorang untuk memobilisasi individu dan kelompok dalam mendukung gerakan (Tindall, 2004). Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Sebuah jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang terdiri dari individu (atau organisasi) disebut “simpul” (*nodes*), yang terikat (terhubung) oleh satu atau lebih tipe hubungan saling ketergantungan tertentu, seperti persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, hubungan kepercayaan, pengetahuan dan prestise. Turner (1998: 521) menyebutkan bahwa unit dari jaringan bisa berupa orang, posisi, korporasi atau aktor-aktor kolektif, atau gambaran setiap entitas. Secara umum, unit-unit ini dikonseptualisasikan sebagai titik-titik (*points*) atau simpul-simpul (*nodes*)

e. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Sebenarnya ada dua perspektif teoritik yang dijadikan dasar analisis, yakni: 1) perspektif teori Gerakan sosial yang mengacu pada mobilisasi sumberdaya, dan 2) perseptif teori

organisasi formal yang mengacu pada lingkungan organisasi. Kedua perspektif ini menekankan bahwa kemampuan masyarakat untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif tergantung atas sumberdaya, yang utama adalah personel dan dana akan tetapi juga meliputi dukungan moral dan legitimasi untuk membentuk struktur yang lebih bisa bertahan yang akan dijadikan basis dari tindakan kolektif masyarakat (*collective community action*).

Hunter & Staggenborg (Milofsky, 1988: 248) selanjutnya menyatakan bahwa sumberdaya (*resources*) seringkali berasal dari sumber-sumber eksternal atas masyarakat lokal, baik bersifat privat, non-profit, atau dana-dana publik untuk mendukung aktivitas-aktivitas dan program-program khusus. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber dana eksternal tergantung atas jaringan hubungan dalam masyarakat lokal, lebih khusus lagi masyarakat lokal, yang mampu menempatkan organisasi-organisasi eksternal yang lainnya ke dalam masyarakat lokal. Melalui kemampuan mobilisasi sumberdaya, kemudian jaringan lokal dan eksternal menghasilkan struktur formal masyarakat lokal. Melalui struktur formal masyarakat lokal ini, kemudian terjadi tindakan yang terorganisir pada masyarakat lokal.

B. Kontekstualisasi Teori Mobilisasi Sumber Daya dalam Program *Njuh Sekolah Maning*

Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Menurut Oberschall, istilah mobilisasi

mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.

Kontekstualisasi Teori Mobilisasi Sumber Daya dalam program NSM dilihat dari lima aspek kajian yaitu organisasi, pemimpin dan kepemimpinan, sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya, jaringan dan partisipasi, dan peluang dan kapasitas masyarakat. Adapun deskripsi dari masing-masing aspek kajian, sebagai berikut:

1. Organisasi Sosial

Organisasi gerakan sosial dalam teori mobilisasi sumber daya hadir menjadi faktor determinan yang penting di mana pembentukan organisasi tersebut inilah yang menjadi roda penggerak utama dalam memobilisasi bahkan mengumpulkan sumber daya untuk melakukan sebuah tujuan tertentu dalam cakupan ini ialah gerakan sosial itu sendiri. Organisasi sendiri dalam pemikiran Porta dan Diani (2006) merupakan identitas yang bersifat kompleks atau formal, untuk mencapai tujuan yang ingin diimplementasikan dalam suatu Gerakan sosial (*social movement*) (Sukmana, 2016). Selain itu, organisasi sosial pun dilihat sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral dan ideal tentang bagaimana seharusnya kehidupan personal atau kelompok termarginalkan dari masyarakat diorganisasikan (Sukmana, 2016). Pada Gerakan sosial, pembentukan organisasi berbicara perihal bagaimana orang-orang atau kelompok bekerjasama dan melibatkan diri dalam suatu kelompok pergerakan sosial atas apa yang mereka anggap ideal dan seharusnya terjadi.

Hal tersebut juga dirasakan pula dengan adanya keberadaan Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan Petarukan. Pembentukan organisasi program Gerakan Njuh Sekolah Maning terkait dengan urgensinya sebagai penuntasan ATS di Kecamatan Petarukan.

Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Pematang dalam pengentasan ATS salah satunya perlu membentuk sebuah organisasi legal secara hukum agar sesuai dengan amanat UUD 1945 dan ketentuan pemerintah. Lebih lengkap pembentukan organisasi Program *Njuh Sekolah Maning* tertuang pada Peraturan Bupati Pematang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun di Kabupaten Pematang. Rintisan penuntasan pendidikan 12 Tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan membentuk tim Gerakan *Njuh Sekolah Maning* tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pematang Nomor 188.4/576/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan *Njuh Sekolah Maning* Kabupaten Pematang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka Tuntas Wajib Belajar Dua Belas Tahun Tingkat Kabupaten Pematang, maka diperlukan Gerakan masyarakat untuk melanjutkan sekolah Kembali
- b. Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Kabupaten Pematang masih banyak anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan *Njuh Sekolah Maning*.

2. Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial (Sukmana, 2016). Pemimpin berfungsi sebagai mobilizator

(*mobilizer*) menginspirasi partisipan (*inspiring participants*), dan di luar gerakan pemimpin berfungsi sebagai artikulator yang menghubungkan antara gerakan dengan masyarakat luas, namun meskipun demikian, karena kompleksitas dari gerakan, maka fungsi dan peran pemimpin dalam gerakan juga bisa bervariasi (Sukmana, 2016). Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemimpin sebuah organisasi gerakan sosial dan bagaimana pemimpin dalam kepemimpinan memiliki arti yang sama pentingnya untuk keberhasilan gerakan sosial.

Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Program NSM terdapat pada pembentukan tim Program Gerakan NSM yang hanya ada di tingkat kabupaten yaitu tim koordinasi program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* sebagai pemangku kebijakan dan mengupayakan adanya regulasi dalam rangka mendukung program NSM dan sekretariat tim koordinasi program *Njuh Sekolah Maning* . Selain itu dari tingkat desa tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten juga terdapat pembentukan KMPP. Komunitas ini memiliki bidang yang masing masing mempunyai tugas verifikasi data, pengembalian anak sekolah dan pendampingan anak sekolah.

Pelaksanaan Program Gerakan NSM dapat berjalan dengan baik dengan anggota tim koordinasi, OPD, tokoh masyarakat dengan cara membagi struktur organisasi menjadi beberapa bagian dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, dengan koordinator atau pemimpin yang berbeda di masing-masing wilayah. Tujuan adanya tim disetiap tingkatan wilayah yaitu agar adanya kepemimpinan yang memobilisasi struktur dan anggota Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* di setiap tingkat wilayah.

3. Sumber Daya

Sumber daya dan mobilisasi sumber daya menjadi faktor determinan selanjutnya dan dapat dikatakan sebagai faktor penentu

kegagalan atau keberhasilan gerakan sosial yang ada. Terdapat 5 tipe sumber daya (*resources*) yang dimiliki gerakan sosial menurut Edwards & McCarthy (Sukmana, 2016), yaitu sumber daya moral (*moral resources*), sumber daya kultural (*cultural resources*), sumber daya organisasi sosial (*social-organizational resources*), sumber daya manusia (*human resources*), dan sumber daya material (*material resources*) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumberdaya Moral

Sumberdaya moral meliputi legitimasi atau hak kekuasaan, dukungan solidaritas, dukungan simpati, dan dukungan orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal. Sumber daya moral (*moral resources*) yang terdapat pada program NSM meliputi legitimasi atau hak kekuasaan yang diberikan dalam bentuk Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun di Kabupaten Pemalang serta Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/576/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan *Njuh Sekolah Maning* Kabupaten Pemalang.

Sumber daya moral lain yang dimiliki program NSM yaitu dukungan simpati serta dukungan solidaritas dari banyak pihak yang ikut terlibat dalam implementasi program NSM di Kecamatan Petarukan. Banyak dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan program NSM di Kecamatan Petarukan. Pihak yang terlibat di tingkat Kecamatan Petarukan mencakup semua lintas sektor, antara lain pemerintah kecamatan, seluruh desa yang ada di kecamatan, instansi terkait lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda atau wadah pemuda, dan organisasi masyarakat. Pada Program NSM dibentuklah yang namanya KMPP ditingkat kecamatan dan desa melibatkan berbagai unsur atau pihak terkait.

Selain dari pihak Kecamatan Petarukan, ada banyak dukungan dari berbagai tim kabupaten yang ikut terlibat dalam mengimplementasikan program NSM di Kecamatan Petarukan. Pihak yang melaksanakan program NSM meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora); Kantor Kementerian Agama; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes); Tim Koordinasi Gerakan *Njuh Sekolah Maning*; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Tingkat Kabupaten; KMPP Tingkat Kecamatan; dan KMPP Tingkat Desa.

b. Sumberdaya Kultural

Sumberdaya kultural tersedia secara lebih luas, dan dapat diakses untuk digunakan secara luas. Kategori sumber daya kultural ini meliputi produksi gerakan atau isu-isu penting seperti musik, literatur, majalah, koran, dan film atau video. Sumberdaya kultural yang dimiliki program NSM terpotret dari disebarluaskannya kegiatan program NSM di situs milik program NSM seperti Facebook *Njuh Sekolah Maning*, Instagram @njuhsekolahmaning dan WhatsApp *Njuh Sekolah Maning*, ditambah beberapa video dokumenter yang memperkenalkan program Gerakan Nuh Sekolah Maning secara umum. Saat ini sudah banyak informasi terkait program NSM melalui media massa sebagai media informasi bagi khalayak umum yang digunakan untuk menunjang program Gerakan NSM.

c. Sumber daya organisasi sosial

Sumber daya organisasi sosial meliputi organisasi sosial yang disengaja (intentional social organization) dan sepadan (appropriate). Organisasi sosial yang disengaja adalah organisasi yang dibentuk secara khusus untuk tujuan gerakan sosial lebih lanjut. Program ini

adalah organisasi sosial yang disengaja dengan tujuan gerakan sosial yang lebih lanjut untuk mempertahankan program NSM tetap berjalan karena tujuannya untuk memastikan anak tidak sekolah di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang benar-benar tuntas.

d. Sumber daya manusia

Kategori sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti: tenaga kerja (*labor*), pengalaman (*experience*), keterampilan (*skills*), dan keahlian. Program NSM memiliki tim-tim khusus yang sudah dibekali kemampuan sesuai dengan bagian-bagiannya.

e. Sumber daya material

Sumber daya material dapat disebut dengan modal fisik dan finansial meliputi sumber-sumber: moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan pembekalan. Pada program ini, pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program NSM dari tahap sosialisasi, pendataan, rekonfirmasi, pengembalian ATS, hingga tahap pendampingan ATS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

4. Jaringan dan Partisipasi

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kolektifitas dari orang-orang yang terlibat dalam upaya menciptakan atau menolak perubahan sosial. Pada program ini terdapat partisipasi dari berbagai individu maupun kelompok masyarakat. Dari individu yang secara sukarela mendonasikan sebagian rezekinya untuk anak tidak sekolah maupun dari kelompok Gerakan Remaja Hebat (GRH), dan juga partisipasi masyarakat yang ikut mendukung dengan mengajak tetangganya yang tidak sekolah untuk bergabung dan ikut

berpartisipasi dalam kegiatan program ini.

5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Peluang dan kapasitas masyarakat memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang akan menghasilkan struktur formal masyarakat lokal. Melalui struktur formal masyarakat lokal ini, kemudian terjadi tindakan yang terorganisir pada masyarakat lokal. Dalam hal ini, kemampuan masyarakat atau orang tua sebagai masyarakat lokal sangat penting dalam keberhasilan program NSM untuk memobilisasi dengan memberi motivasi atau dukungan kepada ATS.

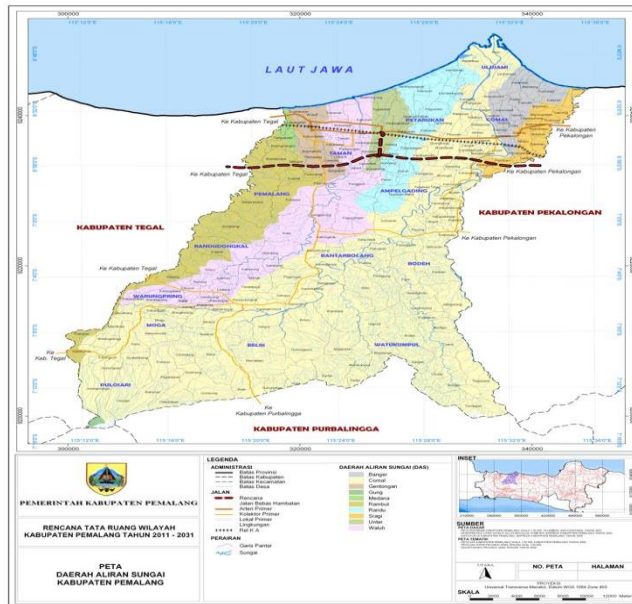
BAB III

PROFIL KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG DAN PROGRAM NJUH SEKOLAH MANING

A. Profil Umum

1. Kondisi Geografis

Gambar 1. Peta Kabupaten Pemalang

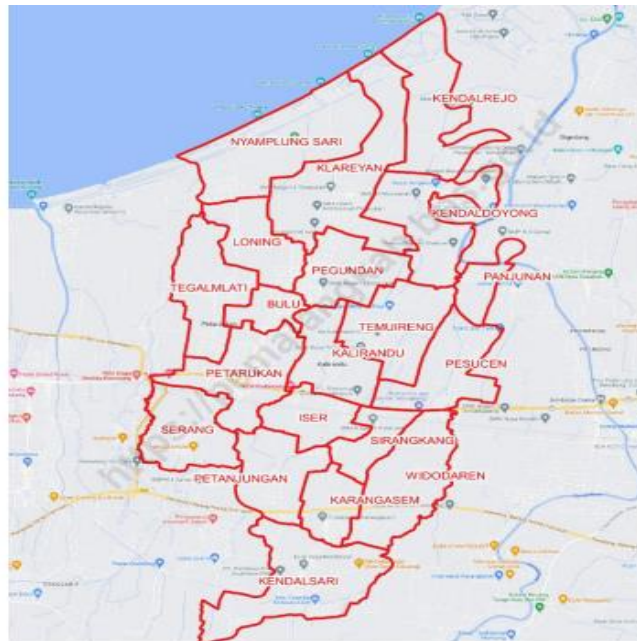


Sumber: Profil Kabupaten Pemalang, 2023

Kabupaten Pemalang merupakan suatu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pemalang di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, dan di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah administrasi Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan dan terdiri dari 222 Desa/Kelurahan, dimana luas wilayah Kabupaten Pemalang sekitar 1.115,30 Km², yang mana

Kecamatan Bantarbolang menjadi kecamatan terluas dengan persentase 12,48% yang diikuti Kecamatan Watukumpul 11,57%, dan Kecamatan Belik 11,17%. Berdasarkan posisi astronomisnya, Kabupaten Pemalang terletak antara $6^{\circ} 52' 30'' - 7^{\circ} 20' 11''$ Lintang Selatan (LS) dan antara $10^{\circ} 17' 30'' - 109^{\circ} 40' 30''$ Bujur Timur (BT).

Gambar 2. Peta Wilayah Kecamatan Petarukan



Sumber : BPS Kab Pemalang (2022)

Kecamatan Petarukan merupakan suatu wilayah kecamatan di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Petarukan memiliki luas wilayah sekitar $81,29 \text{ km}^2$ atau 72,29 % luas dari Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 6,84 wilayah pertanian dan sisanya 33,16% wilayah non pertanian. Kecamatan Petarukan terletak diketinggian 8 M di atas permukaan laut, dimana Kecamatan Petarukan terdiri dari 19 desa, 1 kelurahan, 82 dusun, 103 RW dan 813 RT. Kecamatan Petarukan memiliki batas-batas wilayah yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Ulujami, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan

Ampelgading, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Taman (BPS Kabupaten Pemalang, 2022).

2. Kondisi Topografis

Kabupaten Pemalang memiliki keunikan wilayah yang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu daerah dataran pantai yang memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter diatas permukaan air laut, meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai. Kedua adalah daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 meter dpl yang meliputi 69 desa dan 10 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai. Ketiga daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter dpl yang meliputi 76 desa, terletak di bagian tengah dan selatan. Lalu yang keempat adalah daerah pegunungan yang terbagi menjadi dua, yaitu daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter diatas permukaan laut, meliputi 39 desa yang terletak dibagian selatan. Serta daerah berketinggian 925 meter diatas permukaan laut yang terletak di bagian selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.

Kemiringan lereng atau kelerengan di Kabupaten Pemalang antara lain: (1) Daerah dataran berada pada wilayah bagian utara yang meliputi: Kecamatan Petarukan, Ampelgading, Comal dan Ulujami serta wilayah Kecamatan Pemalang, 39 Taman, Randudongkal dan Bodeh dengan presentase kemiringan lereng 0 – 2 %, (2) Daerah dengan kemiringan lereng antara 2 – 15 % terdapat disebagian Kecamatan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, dan Belik. Daerah perbukitan yang cukup curam dengan kemiringan lereng antara 15– 45 % terdapat di Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Belik, dan Pulosari serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Bodeh. Daerah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % hanya terdapat di Kecamatan Moga dan Belik.

Kabupaten Pemalang memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C sampai dengan 31°C. Curah hujan di Kabupaten Pemalang antara 2.000 sampai dengan 6.700 mm/tahun dengan rata-rata 267 mm/tahun. Curah hujan paling tinggi terjadi pada antara bulan Januari hingga Februari yaitu 593 mm dan 673 mm sedangkan curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Agustus yang hanya mencapai 60 mm. Selain itu struktur tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik. Lalu struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur aluvium, tapak formasi, rambatan formasi, produk vulkanik, produk vulkanik lava dan halang formasi

3. Kondisi Demografi

Keadaan suatu demografi atau penduduk juga akan menentukan keadaan kesejahteraan masyarakatnya, dimana kondisi demografi sangat dipengaruhi dari kelahiran, kematian hingga perpindahan penduduk. Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk sekitar 1.484.209 jiwa dengan kepadatan rata-rata 1.362/ km² dengan rincian terdapat 752.565 jiwa laki-laki dan terdapat 731.644 jiwa perempuan (BPS Kabupaten Pemalang, 2022). Kecamatan Petarukan memiliki jumlah penduduk sekitar 173.517 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.15 jiwa per km², dengan rincian 89.917 jiwa laki-laki dan 87.249 jiwa perempuan. Menurut data BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2022 terdapat jumlah penduduk Kecamatan Petarukan menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Kecamatan Petarukan menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-4 Tahun	7.115	6.471	13.586
2.	5-9 Tahun	7.714	7.156	14.870
3.	10-14 Tahun	7.301	6.891	14.192
4.	15-19 Tahun	6.390	5.998	12.388
5.	20-24 Tahun	7.526	7.172	14.698
6.	25-29 Tahun	8.518	7.387	15.402
7.	30-34 Tahun	7.226	6.548	13.774
8.	35-39 Tahun	7.399	6.817	14.216
9.	40-44 Tahun	6.631	6.672	13.303
10.	45-49 Tahun	5.865	6.009	11.874
11.	50-54 Tahun	4.942	5.173	10.085
12.	55-59 Tahun	4.425	4.895	9.320
13.	60-64 Tahun	3.514	3.748	7.262
14.	65-69 Tahun	2.684	2.761	5.445
15.	70-74 Tahun	1.657	1.694	3.351
16.	75 ke atas	1.513	1.887	3.400
Total		89.917	87.249	177.166

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun, 2022

Sesuai data di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang didominasi oleh kelompok umur 25-29 sebanyak 15.402 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada kelompok umur 75 ke atas atau lansia yang lahir di tahun 1953an yaitu sebanyak 3.400 jiwa..

4. Kondisi Pendidikan

Kondisi penduduk Kecamatan Petarukan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. Penduduk Kecamatan Petarukan berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Akhir	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	61.904
2	Tamat SD/Sederajat	65.285
3	SLTP/Sederajat	25.107
4	SLTA/Sederajat	17.027
5	Diploma I/II	576
6	Akademi/Diploma III/S.Muda	1.034
7	Diploma IV/Strata I	2.506
8	Strata II	68
9	Strata III	10

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2022

Menurut data di atas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Petarukan tentang pentingnya pendidikan sangat rendah. Penduduk Kecamatan Petarukan masih berpendidikan jenjang SD/Sederajat sehingga bisa dikatakan rata-rata penduduk Kecamatan Petarukan berada pada kelompok pendidikan rendah. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya ATS di Kecamatan Petarukan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan Petarukan harus terus diupayakan untuk menekan angka anak tidak sekolah di Kecamatan Petarukan.

Tabel 3. Banyak sekolah, guru dan murid di Kecamatan Petarukan

No	Jenjang Sekolah	Sekolah	Guru	Murid
----	-----------------	---------	------	-------

1	Taman Kanak-kanan (TK)			
	- Negeri	1	3	50
	- Swasta	42	93	1.777
2	Sekolah Dasar (SD)			
	- Negeri	74	632	13.464
	- Swasta	6	28	734
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)			
	- Negeri	0	0	0
	- Swasta	11	132	2.052
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
	- Negeri	6	306	4.974
	- Swasta	5	58	936
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)			
	- Negeri	1	77	1.045
	- Swasta	5	110	900
6	Sekolah Menengah Umum (SMU)			
	- Negeri	1	90	1.168
	- Swasta	1	8	15
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
	- Negeri	1	92	1.861
	- Swasta	8	171	3.541
8	Madrasah Aliyah (MA)			
	- Negeri	0	0	0
	- Swasta	2	39	206
6	Perguruan Tinggi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Pematang, 2022

Ketersediaan fasilitas pendidikan Kecamatan Petarukan memiliki 1 TK Negeri dengan 3 guru dan 50 murid serta 42 TK Swasta dengan 93 guru dan 1.777 murid. Pada jenjang sekolah dasar memiliki 74 SD Negeri dengan 632 guru dan 13.464 murid. 6 SD Swasta dengan 28 guru dan 734 murid. Serta 11 MI Swasta dengan 132 guru dan 2.052 murid. Pada jenjang sekolah menengah memiliki 6 SMP Negeri dengan 306 guru dan 4.974 murid. 5 SMP Swasta dengan 58 guru dan 936 murid. Serta 1 MTs Negeri dengan 77 guru dan 1.045 murid. 5 MTs Swasta dengan 110 guru dan 900 murid. Kemudian pada jenjang sekolah menengah atas memiliki 1 SMA Negeri dengan 90 guru dan 1.168 murid. 1 SMA Swasta dengan 8 guru dan 15 murid. 1 SMK Negeri dengan 92 guru dan 1.861 murid. 8 SMK Swasta dengan 171 guru dan 3.541 murid. 2 MA Swasta dengan 39 guru dan 206 murid.

5. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Petarukan memiliki hubungan sosial yang masih sangat kuat, hal ini dilihat dari masih adanya gotong royong dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Petarukan dilakukan untuk menambah rasa kekeluargaan antar masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti pengajian, takziah, hajatan, bersih lingkungan dan lainnya menjadikan masyarakat sekitar akan saling membantu dan gotong royong satu sama lain. Maksud dari gotong royong yang dilakukan masyarakat yaitu untuk membantu dan memudahkan pekerjaan serta mempercepat dalam menyiapkan sesuatu pada saat kegiatan. Hal tersebut menjadikan masyarakat Kecamatan Petarukan rukun dan tentram. Kondisi budaya masyarakat Kecamatan Petarukan masih kuat mempertahankan adat istiadat, tradisi dan budaya peninggalan masa lalu yang positif seperti

kerjabakti, gotong royong, nyadran, sedekah bumi, halal bi halal dan lainnya.

Petarukan adalah sebuah kecamatan yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Kecamatan petarukan memiliki pasar induk, yaitu Pasar Petarukan yang menyediakan hampir segala kebutuhan penduduknya dan pusat perekonomian di Petarukan. Pasar Petarukan juga dikenal akan barang tekstilnya yang murah serta berkualitas.

Tabel 4. Penduduk Kecamatan Petarukan berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Wiraswasta	14.408
2	Karyawan swasta	10.191
3	Buruh tani/perkebunan	8.574
4	Petani/pekebun	7.709
5	Buruh harian lepas	6.675
6	Pedagang	4.025
7	Perdagangan	2.795
8	Guru	1.256
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.072
10	Pensiunan	443
11	Lainnya	107.070

Sumber : Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pemalang (Sidekem), 2022

Berdasarkan tabel di atas mayoritas bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Petarukan adalah wiraswasta sebanyak 14.408 jiwa dan disusul oleh karyawan swasta sebanyak 10.191 jiwa. Sesuai data yang ada

masyarakat Kecamatan Petarukan kebanyakan bermata pencaharian sebagai wiraswasta. Hal ini tidak lepas karena Kecamatan Petarukan merupakan kawasan jalan pantura yang terdapat banyak industri pabrik, pedagang dan jasa, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Kecamatan Petarukan bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan swasta. Akan tetapi banyak juga masyarakat Kecamatan Petarukan yang bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani karena wilayah Kecamatan Petarukan juga terdapat lahan pertanian.

B. Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning*

1. Profil Program *Njuh Sekolah Maning*

Program *Njuh Sekolah Maning* diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2021 Tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 Tahun di Kabupaten Pematang Jaya. Program NSM diresmikan pada tanggal 25 Januari 2022. Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* merupakan gerakan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan pemangku kepentingan beserta Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang saling bersinergi untuk menurunkan angka ATS dengan cara mengupayakan dan mendukung pengembalian anak usia sekolah yang tidak bersekolah, melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Unsur pemangku kepentingan yang terlibat di dalam tim koordinasi Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* yaitu Bupati; Sekretaris Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pendidikan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kantor Kementerian Agama; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dewan Pendidikan; LP Ma'arif Nahdatul Ulama Kabupaten Pematang Jaya; Badan Amil Zakat Nasional; Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; dan lainnya.

Program ini merupakan salah satu program untuk mengembalikan anak yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah baik formal maupun non formal. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Program *Njuh Sekolah Maning* bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan kesetaraan dalam pembelajaran seperti kejar paket A (setara SD), kejar paket B (setara SMP) dan kejar paket C (setara SMA). Singkatnya program ini menginginkan minimal pendidikan anak-anak belajarnya adalah setingkat SMA ataupun setara dengan Paket C selama 12 tahun SD, SMP, dan SMA.

Program NSM dikukuhkan oleh Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Pemalang. Adapun maksud dan tujuan dikukuhkannya Perbup tersebut, yaitu:

- a. Rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun adalah untuk penuntasan pendidikan dua belas tahun bagi setiap warga Kabupaten Pemalang
- b. Rintisan penuntasan Pendidikan 12 Tahun bertujuan untuk mengumpulkan data anak usia sekolah, mengarahkan, membantu dan memfasilitasi mereka untuk bersekolah bersekolah atau kembali bersekolah setidaknya lulus pendidikan menengah (SMA/ sederajat)
- c. Rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun bertujuan untuk meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang

2. Sasaran dan Tujuan Program *Njuh Sekolah Maning*

Sasaran program *Njuh Sekolah Maning* sebagai rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun adalah anak yang belum mengikuti pendidikan, anak usia sekolah yang putus sekolah dan/atau putus tapi tidak lanjut, baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat. Adapun kriteria yang menjadi sasaran rintisan

penuntasan pendidikan dua belas tahun yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Pemalang Pasal 3 ayat 1, yaitu:

- a. Anak yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD atau Pendidikan yang sederajat.
- b. Anak yang telah lulus SD atau pendidikan yang sederajat yang belum memperoleh kesempatan belajar dan yang putus sekolah di SMP atau pendidikan yang sederajat.
- c. Anak yang telah lulus SMP atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMA atau pendidikan yang sederajat
- d. Anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan Pendidikan dua belas tahun.

Program *Njuh Sekolah Maning* bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Kabupaten Pemalang.
- b. Mendata warga usia sekolah, mengarahkan, membantu dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa bersekolah atau kembali bersekolah agar mendapat pendidikan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

3. Tim Koordinasi Program Njuh Sekolah Maning Kabupaten Pemalang tahun 2021-2023

Tim koordinasi Program *Njuh Sekolah Maning* merupakan sebuah Lembaga yang dibentuk untuk mendukung program *Njuh Sekolah Maning* di Kabupaten Pemalang di ranah kebijakan. Pembentukan tim koordinasi program *Njuh Sekolah Maning* ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/ 576/ Tahun 2021 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan “Njuh Sekolah Maning” Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2023

Adapun unsur pemangku kepentingan yang terlibat di dalam tim koordinasi program Njuh Sekolah Maning yaitu Bupati; Sekertariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial KBPP; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja; Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional; Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; dan lainnya.

Tim Koordinasi Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* memiliki visi yaitu “Memastikan semua anak yang tidak sekolah untuk bersekolah di satuan pendidikan formal maupun non formal”. Mengacu pada visi tim koordinasi Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan ATS menggunakan aplikasi sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM)
- b. Menetapkan data ATS.
- c. Melakukan verifikasi dan validasi data ATS yang mau di kembalikan ke satuan pendidikan.
- d. Mendampingi ATS dengan melibatkan tim pendata dan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Kabupaten Pematang Jaya agar anak yang sudah dikembalikan tetap mengenyam pembelajaran di sekolah.
- e. Melakukan monitoring baik berbasis online maupun manual, sesuai dengan tools yang sudah dimiliki.
- f. Melakukan sosialisasi Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* di semua lini.
- g. Melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi seputar pengembalian anak tidak sekolah.

- h. Bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau lainnya dalam kajian penanganan anak tidak sekolah kembali bersekolah.
- i. Mengupayakan adanya regulasi, penganggaran baik APBD Kabupaten, dukungan dana desa dan pendokumentasian Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning*.
- j. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha (CSR) untuk mendukung Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning*

Adapun tugas dan tanggung jawab tim koordinasi program Njuh Sekolah Maning sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan verifikasi data anak tidak sekolah dari data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dan data dukung lainnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan perusahaan untuk mendukung Gerakan “Njuh Sekolah Maning”
- c. Melakukan proses pengembalian anak ke sekolah
- d. Melakukan pendampingan bagi anak yang kembali sekolah sampai selesai minimal pendidikan dasar
- e. Melakukan advokasi kepada tokoh-tokoh strategis untuk kelancaran Program *Njuh Sekolah Maning*
- f. Camat menjadi penanggung jawab Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* di wilayah kecamatan
- g. Camat menindaklanjuti Keputusan Bupati ini dan membuat Keputusan Camat yang menunjuk masing-masing Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya menjadi penanggung jawab di desa/kelurahan
- h. Melaporkan seluruh kegiatan Program *Njuh Sekolah Maning* kepada Bupati Pematang

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM *NJUH SEKOLAH MANING* DALAM PENGENTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Bab ini membahas mengenai implementasi Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* (NSM) di Kabupaten Pemalang dengan studi kasus di Kecamatan Petarukan. Implementasi program NSM dalam penelitian ini akan dilihat dari bagaimana tahap-tahap yang dilakukan program NSM di Kecamatan Petarukan yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori Mobilisasi Sumberdaya.

A. Tujuan Organisasi

Organisasi gerakan sosial, sebagaimana teori mobilisasi sumber daya hadir menjadi faktor determinan yang penting di mana pembentukan organisasi tersebut inilah yang menjadi roda penggerak utama dalam memobilisasi bahkan mengumpulkan sumber daya untuk melakukan sebuah tujuan tertentu. Organisasi sendiri dalam pemikiran Porta dan Diani (2006) merupakan identitas yang bersifat kompleks atau formal, untuk mencapai tujuan yang ingin diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial (social movement) (Sukmana, 2016). Pada gerakan sosial, pembentukan organisasi berbicara perihal bagaimana orang-orang atau kelompok bekerjasama dan melibatkan diri dalam suatu kelompok pergerakan sosial atas apa yang mereka anggap ideal dan seharusnya terjadi.

Pembentukan organisasi program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* terkait dengan urgensinya sebagai penuntasan ATS di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengentasan ATS salah satunya perlu membentuk sebuah organisasi legal secara hukum agar sesuai dengan amanat UUD 1945 dan ketentuan pemerintah. Lebih lengkap pembentukan organisasi Program *Njuh Sekolah Maning* tertuang pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan

Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun di Kabupaten Pemalang. Rintisan penuntasan pendidikan 12 Tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan membentuk tim Gerakan *Njuh Sekolah Maning* tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/576/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan *Njuh Sekolah Maning* Kabupaten Pemalang dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka Tuntas Wajib Belajar Dua Belas Tahun Tingkat Kabupaten Pemalang, maka diperlukan gerakan masyarakat untuk melanjutkan sekolah kembali
2. Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Kabupaten Pemalang masih banyak anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gerakan *Njuh Sekolah Maning*.

B. Keterlibatan Aktor Pelaksana

Keberhasilan maupun kegagalan program sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat karena bertugas langsung untuk melaksanakan program (Wardani, 2015). Implementasi kebijakan program melibatkan berbagai aktor, seperti aktor yang berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi dari kalangan birokrasi, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi komunitas. Hal tersebut senada dengan pernyataan IA selaku PIC Program *Njuh Sekolah Maning* Kabupaten Pemalang bahwa:

“Kalau di Kabupaten Pemalang itu terdapat dua pelaksana. Pertama tim kabupaten yang tim koordinasi, kemudian yang kedua kan sekretariat tim koordinasi. Jadi sudah ada

kepengurusan di program *Njuh Sekolah Maning* itu, juga ada struktur kesekretariatan. Tim Koordinasi diketuai oleh Kepala Bappeda. Jadi Sekda sebagai penanggungjawab penuh atas program pemerintah kabupaten untuk memastikan ATS kembali bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan itu sekertaris. Tim ini dianggotakan oleh beberapa OPD pengampu tentang ATS seperti Dinpermasdes, Dinas Sosial, Dewan Pendidikan, organisasi NU dan Muhammadiyah. Lalu ada tambahan dari forum CSR. Kemudian dari KMPP sebagai anggota khusus untuk program NSM. Ada yang Namanya Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) mulai ditingkat desa, tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat kabupaten.”

Berdasarkan wawancara diatas, terdapat pembentukan tim Program Gerakan NSM yang hanya ada di tingkat kabupaten yaitu tim koordinasi program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* sebagai pemangku kebijakan dan mengupayakan adanya regulasi dalam rangka mendukung program NSM dan sekretariat tim koordinasi program *Njuh Sekolah Maning*. Selain itu dari tingkat desa , tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten juga terdapat pembentukan KMPP. Komunitas ini memiliki bidang yang masing masing mempunyai tugas verifikasi data, pengembalian anak sekolah dan pendampingan anak sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pemimpin dan kepemimpinan pada masing-masing tim.di setiap wilayah.

Pemimpin gerakan (leaders movement) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (strategic decision-makers) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial (Sukmana, 2016). Pemimpin berfungsi sebagai mobilizator (mobilizer) menginspirasi partisipan (inspiring participants), dan di luar gerakan pemimpin berfungsi sebagai artikulator yang menghubungkan antara gerakan dengan masyarakat luas, namun meskipun demikian, karena kompleksitas dari gerakan, maka fungsi dan peran pemimpin dalam gerakan juga bisa bervariasi (Sukmana, 2016). Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemimpin sebuah organisasi

gerakan sosial dan bagaimana pemimpin dalam kepemimpinan memiliki arti yang sama pentingnya untuk keberhasilan gerakan sosial.

Dalam Program Gerakan NSM di Kabupaten Pematang, agar organisasi berjalan dengan baik dengan anggota tim koordinasi, OPD, tokoh masyarakat dan KMPP, maka program NSM membagi struktur organisasi menjadi beberapa bagian dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, dengan koordinator khusus di bidang-bidang yang ada didalam program NSM untuk mengimplementasikan program NSM. Sehingga di setiap tingkatan wilayah terdapat pimpinan-pimpinan yang memobilisasi struktur dan anggota Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning*.

C. Prosedur Program

1. Sosialisasi

Sosialisasi menurut program NSM adalah hal yang penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait program Gerakan *Njuh Sekolah Maning*. Kegiatan sosialisasi juga sangat penting karena apabila tidak ada sosialisasi maka dapat dipastikan apapun tujuan yang dimaksudkan diri kita ataupun sebuah program untuk masyarakat tidak akan tercapai.

Sosialisasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memberitahu, membujuk ataupun mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan serta memanfaatkan adanya sebuah program. Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi terkait yang akan disampaikan, akan tetapi kegiatan sosialisasi juga untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat.

Berikut wawancara dengan Andri Adi selaku camat dari Kecamatan Petarukan :

“Di Kecamatan Petarukan pihak yang terlibat mencakup semua lintas sektor, pemerintah kecamatan, kalangan pemuda atau wadah pemuda, dan organisasi masyarakat. Kami juga menghadirkan pak kyai di beberapa desa, karena apa ya untuk support bahwa sekolah itu belajar itu wajib, kemudian yang lebih utama adalah support dan pendampingan dari pemerintah desa karena dari pemerintah desa itu yang akan mensupport dan memastikan orang tuanya agar mendampingi, memastikan anaknya mau sekolah lagi. Kepala desa juga mengajak khusus perangkat desanya, mengajak RT dan RW, serta melibatkan PKK” (Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Petarukan pada tanggal 3 April 2023 pukul 15.50 WIB)

Gambar 3. Sosialisasi Program Njuh Sekolah Maning Kecamatan Petarukan



Sumber: Dokumentasi Program Njuh Sekolah Maning, 2022

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi, program NSM mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak yang ingin ikut terlibat dalam mengimplementasikan program NSM di Kecamatan Petarukan. Pihak yang terlibat di tingkat Kecamatan Petarukan mencakup semua lintas

sektor, antara lain pemerintah kecamatan, seluruh desa yang ada di kecamatan, instansi terkait lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda atau wadah pemuda, dan organisasi masyarakat. Pada Program NSM dibentuklah yang namanya KMPP ditingkat kecamatan dan desa melibatkan berbagai unsur atau pihak terkait.

Selain dari pihak Kecamatan Petarukan, ada banyak dukungan dari berbagai tim kabupaten yang ikut terlibat dalam mengimplementasikan program NSM di Kecamatan Petarukan. Pihak yang melaksanakan program NSM meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora); Kantor Kementerian Agama; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes); Tim Koordinasi Gerakan *Njuh Sekolah Maning*; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Tingkat Kabupaten; KMPP Tingkat Kecamatan; dan KMPP Tingkat Desa.

Berdasarkan pernyataan diatas terkait banyaknya dukungan para tokoh masyarakat jika dianalisis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya Anthony Oberschall terlihat bahwa terdapat sumberdaya moral. Sumberdaya moral meliputi legitimasi atau hak kekuasaan, dukungan solidaritas, dukungan simpati, dan dukungan orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal (Sukmana, 2016). Sumber daya moral yang dimiliki program NSM yaitu dukungan simpati serta dukungan solidaritas dari banyak pihak yang ikut terlibat dalam implementasi program NSM di Kecamatan Petarukan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek misalnya membujuk ATS untuk kembali bersekolah melalui program NSM. Sedangkan tujuan jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan program Gerakan NSM agar

tetap berjalan. Tujuan dari program NSM perlu disosialisasikan untuk menghindari penyimpangan berita atau informasi yang kurang tepat. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi program NSM dapat dilihat dari wawancara Andri Adi selaku Camat Kecamatan Petarukan, sebagai berikut:

“Awal mula sosialisasi program NSM itu dilakukan oleh tim koordinasi kabupaten. Tingkat kecamatan kami sudah melaksanakan langkah sosialisasi dan mengajak *stakeholder* serta birokrasi untuk memberi tahu dan memantau seberapa banyak seberapa serius kondisi anak-anak yang putus sekolah pada usia sekolah. Sosialisasi sudah dilakukan tingkat desa, per desa semuanya. Narasumber, program dari kabupaten sehingga jadwal dari kabupaten. Kalau jadwal sosialisasi sejak bulan Februari sudah mulai dilakukan. Bulan Februari, Maret, dan April itu sosialisasi ke kecamatan dan desa. Kehadiran dari kabupaten dan dari kecamatan hingga pemerintah desa bersama warga si anak putus sekolah dan orang tua yang mendampingi atau keluarga yang mendampingi apakah itu bapaknya atau ibunya atau saudaranya harus ada pendampingan”.

Berdasarkan pernyataan diatas, awal sosialisasi dilakukan oleh tim koordinasi kabupaten ke kecamatan yang dihadiri tim kabupaten, tim kecamatan hingga pemerintah desa. Kemudian pemerintah Kecamatan Petarukan juga sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa dengan didampingi tim koordinasi kabupaten. Sosialisasi program NSM dilakukan secara bertahap karena mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat ada perubahan atau tidak dalam pelaksanaan program NSM. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media sosial ataupun website yang dimiliki oleh program NSM. Hal tersebut senada dengan pernyataan Ikmaludin Aziz selaku PIC program NSM, bahwa:

“sosialisasi untuk publikasi program NSM itu bisa secara langsung maupun gak langsung. Kita juga menggunakan media sosial untuk publikasi ke warga, pokoknya semua yang bisa ya kita kerahkan semua saja. Ada facebook Njuh Sekolah Maning, ada WhatsAppnya, ada Instagram @njuhsekolahmaning, ada juga youtubanya cuman tidak update. Tapi sebenarnya sudah banyak untuk video dokumenter program ini. Banyak juga website-website yang sudah mensosialisasikan atau artikel-artikel seputar informasi program NSM”

Berdasarkan pernyataan di atas jika dianalisis dengan teori Mobilisasi Sumberdaya Anthony Oberschall terlihat bahwa terdapat sumberdaya kultural. Sumberdaya kultural tersedia secara lebih luas, dan dapat diakses untuk digunakan secara luas. Sumberdaya kultural yang dimiliki program NSM terpotret dari disebarluaskannya kegiatan program NSM di situs milik program NSM seperti Facebook Njuh Sekolah Maning, Instagram @njuhsekolahmaning dan WhatsApp Njuh Sekolah Maning, ditambah beberapa video dokumenter yang memperkenalkan program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* secara umum. Saat ini juga sudah banyak informasi terkait program NSM melalui media massa sebagai media informasi bagi khalayak umum yang digunakan untuk menunjang program Gerakan NSM.

2. Pendataan

a. Pelatihan Pendataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelatihan berasal dari kata latih yang berarti olah, pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh kecakapan. Jadi, pelatihan merupakan proses, cara, kegiatan atau pekerjaan melatih untuk membiasakan atau memperoleh kecakapan.

Pelatihan pendataan menjadi sarana motivasi sebagai pendorong bagi tim pendata agar dapat bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemampuan tim pendata dalam mendata ATS. Pelatihan pendataan diselenggarakan dengan maksud agar tim pendata data memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan oleh tim koordinasi. Pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana sebagai fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian serta perilaku tim pendata.

Tujuan diselenggarakannya pelatihan pendataan dikarenakan tim koordinasi menginginkan adanya peningkatan atau perubahan kemampuan tim pendata sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan program NSM. Pelatihan diharapkan dapat membentuk sikap dan tingkah laku tim pendata dalam melakukan pendataan agar dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan pendataan yang akan dihadapinya, seperti sikap dalam menghadapi permasalahan dalam mendata ATS. Pelatihan juga bertujuan untuk lebih mengaktifkan kinerja para tim pendata, meminimalisir dampak negative yang dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pengalaman yang terbatas, atau kurangnya kepercayaan diri dari tim pendata.

Tujuan pelatihan pendataan akan terlaksana dengan baik apabila pelatihan diberikan secara tepat dan adanya kerjasama yang baik antara tim pendata dan tim koordinasi maupun ATS beserta keluarganya. Pelatihan bertujuan agar tim pendata lebih cepat berkembang, karena jika hanya mengandalkan berdasarkan pengalaman tanpa adanya suatu pelatihan khusus maka akan sulit bagi individu untuk berkembang. Sehingga melalui pelatihan pengembangan diri akan lebih cepat.

Berikut hasil wawancara Ikmaludin Aziz selaku PIC program NSM :

“Pelatihan pendataan itu dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 29 Maret 2022 bertempat di masing-masing pendopo kecamatan dan diikuti seluruh calon pendata ATS dari 25 Desa Replikasi sejumlah 160 pendata, untuk pelatihan ini ada anggarannya juga bersumber dari APBD tahun 2022 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)”

Gambar 4. Pelatihan Pendata dan Pendataan SIPBM ATS



Sumber: Dokumentasi tim koordinasi Program NSM, 2022

Pernyataan tersebut di atas jika dianalisis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya Anthony Oberschall terdapat sumberdaya manusia (*human resources*) dan sumberdaya material (*material resources*). Sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti : tenaga kerja (*labor*), pengamanaan (*experience*), keterampilan (*skills*), dan keahlian (*expertise*). Sumberdaya yang dimiliki yaitu tim pendata yang telah melakukan pelatihan pendataan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, keahlian dalam pendataan ATS. Melalui pelatihan pendataan menjadikan individu dari tim pendata memiliki kemampuan tertentu untuk membantu mencapai

tujuan program NSM. Melalui pelatihan, tim pendata akan menjadi lebih terampil sehingga akan lebih produktif dalam melaksanakan pendataan. Dalam pelatihan itu, para pendata di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Petarukan akan dilatih tentang bagaimana proses pendataan sampai dengan pelaporannya dan mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah. Dengan pelatihan tersebut harapannya mereka sudah siap untuk diterjunkan ke masyarakat dengan bekal kemampuan yang sudah mereka miliki guna melakukan pendataan terhadap anak tidak sekolah di desa mereka masing masing.

Implementasi program gerakan NSM pada tahap pelatihan pendataan juga harus memperoleh dukungan sumberdaya finansial yang digunakan untuk membiayai proses pelatihan pendataan sampai pendataan dan biaya operasionalitas. Apabila pada pelaksanaan program NSM tidak didukung oleh sumberdaya finansial maka pelaksanaan program tidak akan efektif atau tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan sumberdaya finansial yang memadai dapat membuat pelaksanaan sebuah program berlangsung efektif dan mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Berikut wawancara peneliti dengan Ikmaludin Aziz selaku PIC program *Njuh Sekolah Maning*:

“Anggaran itu, jadi tahun 2022 itu kita menyediakan anggaran sejumlah 211.329.000 itu digunakan khusus untuk pembiayaan dari mulai pelatihan pendataan sampai honor pendataan. Kemudian untuk lainnya untuk operasional kesekretariatan disini memang ada, jumlahnya 31.040.000. Jadi totalnya ada 242.369.000 tapi untuk khusus yang ini 211.329 itu untuk pendanaan khusus untuk dari proses pelatihan sampai pendataan”

Berdasarkan wawancara diatas terdapat sumberdaya material dalam implementasi program NSM. Sumberdaya material diartikan sebagai modal fisik dan finansial, meliputi sumber-sumber: moneter (*monetary*), hak milik (*property*), ruang kantor (*office space*), peralatan (*equipments*) dan perbekalan (*supplies*). Terdapat sumberdaya finansial sebagai pembiayaan pelatihan pendataan dan pendataan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 211.329.000 dan biaya operasionalitas sejumlah Rp.30.040.000.

b. Pendataan

Pendataan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) didefinisikan menjadi dua pengertian. Pengertian pertama pendataan merupakan cara, proses, atau perbuatan mendata. Pengertian kedua pendataan diartikan sebagai pengumpulan data. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendataan adalah proses pembuktian yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Menurut peneliti pendataan adalah proses pencarian data dan pengumpulan data yang ditemukan dari hasil penelitian.

Pendataan dilakukan oleh tim pendata desa atau KMPP dengan metode *door to door* yaitu kunjungan dari rumah ke rumah melalui SIPBM. SIPBM adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan pelaporannya. Di dalam SIPBM terdapat output yang meliputi sosial ekonomi, pendidikan, kependudukan, kesehatan, dan catatan sipil, perlindungan anak, air dan sanitasi serta perumahan. Adapun output data SIPBM pada bidang pendidikan meliputi partisipasi sekolah, anak di luar sekolah, lama sekolah, jarak dan waktu tempuh ke fasilitas pendidikan, dan buta huruf.

Data SIPBM bidang pendidikan di desa digunakan untuk mencacah ATS yang dilaksanakan oleh petugas pendataan desa. Tidak hanya dari SIPBM, sumber pendataan ATS juga bisa didapatkan pada satuan pendidikan yang melaporkan ke UPT dinas pendidikan dan olahraga (Dindikpora) yang bekerjasama dengan kecamatan serta dari BPS. Adapun hasil pendataan ATS yang diperoleh tim pendata di Kecamatan Petarukan berjumlah 354 anak sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Pendataan ATS Kecamatan Petarukan Tahun 2022

Desa	Jumlah KK terdata	Populasi Anak Usia 7-18 Tahun				
		Sekolah	Tidak Bersekolah			
			Belum Sekolah	Putus Sekolah	Lulus Tidak Lanjut	Total Tidak Sekolah
Panjunan	565	617	2	10	33	45
Serang	1.163	1.310	1	22	58	81
Pegundan	1.617	1.878	17	26	63	106
Kalirandu	1.160	1.268	16	20	47	83
Klareyan	1.090	1.254	5	14	20	39
Jumlah	5.595	6.327	41	92	221	354

Sumber : BAPPEDA Kab. Pemalang 2022

Data ATS tersebut kemudian akan dilaporkan ke sekretariat program NSM yang mana data tersebut akan dimanfaatkan sebagai sasaran atau targer program NSM. Saat ini Kecamatan Petarukan mereplikasikan ke 5 desa yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem yaitu Desa Panjunan, Serang, Pegundan, Kalirandu dan Klareyan. Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2022

menunjukkan bahwa keseluruhan jumlah anak tidak sekolah Desa replikasi di Kecamatan Petarukan berjumlah 354 anak. Desa Pegundan menempati posisi tertinggi di Kecamatan Petarukan dengan jumlah ATS sebanyak 106 anak, disusul Desa Kalirandu sebanyak 83 anak, Desa Serang sebanyak 81 anak, Desa Panjunan sebanyak 45 anak, dan terakhir Desa Klareyan 39 anak. Selanjutnya, jika data ATS sudah didapatkan oleh tim maka akan dilakukan tahapan yang berikutnya.

Banyaknya ATS di Kecamatan Petarukan yang sudah terdata pada tabel diatas yaitu sebanyak 354 ATS. Menurut tim pendata tingginya angka ATS di Kecamatan Petarukan disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana tertera pada tabel berikut:

- 1) Belum pernah sekolah

Tabel 6. Faktor Penyebab ATS Belum Pernah Bersekolah

No	Alasan Tidak Sekolah	7-18 Tahun		
		L	P	Total
1	Tidak ada biaya	6	7	13
2	Disabilitas	12	16	28
Total		18	23	41

Sumber: BAPPEDA Kab Pemalang, 2022

Berdasarkan data diatas terdapat alasan anak tidak sekolah, umur anak, jenis kelamin beserta totalnya. Alasan ATS yang belum pernah sekolah paling banyak disebabkan karena faktor disabilitas sebanyak 28 ATS dan faktor tidak ada biaya sebanyak 13.

- 2) Putus Sekolah

Tabel 7. Faktor Penyebab ATS Putus Sekolah

No	Alasan Tidak Sekolah	7-18 Tahun		
		L	P	Total
1	Mengalami kekerasan/trauma di sekolah	1	0	1
2	Sekolah tidak penting	0	2	2
3	Menikah/Hamil diluar nikah	0	6	6
4	Pengaruh lingkungan/teman	4	2	6
5	Bekerja mendapat upah	8	9	17
6	Tidak ada biaya	19	23	42
7	Tidak mau sekolah	10	7	17
8	Disabilitas	1	0	1
Total		43	49	92

Sumber: BAPPEDA Kab Pemalang, 2022

Berdasarkan data diatas terdapat alasan anak tidak sekolah, umur anak, jenis kelamin beserta totalnya. Alasan ATS yang putus sekolah paling banyak disebabkan karena faktor tidak ada biaya sebanyak 42 ATS, yang kedua faktor bekerja sebanyak 17 ATS, disusul faktor tidak mau sekolah sebanyak 17 ATS. Faktor menikah/hamil diluar nikah sebanyak 6 ATS, disusul faktor pengaruh lingkungan sebanyak 6 ATS. Faktor sekolah tidak penting sebanyak 2 ATS. Faktor mengalami kekerasan/trauma di sekolah sebanyak 1 ATS dan terakhir faktor disabilitas sebanyak 1 ATS.

3) Lulus Tidak Lanjut

Tabel 8. Faktor Penyebab ATS Lulus Tidak Lanjut

No	Alasan Tidak Sekolah	7-18 Tahun		
		L	P	Total

1	Pengaruh lingkungan	2	1	3
2	Bekerja	31	17	48
3	Sekolah tidak penting	1	4	5
4	Sekolahnya jauh	1	3	4
5	Menikah	4	20	24
6	Tidak ada biaya	49	54	103
7	Tidak mau sekolah	21	13	34
Total		109	112	221

Sumber: BAPPEDA Kab Pemalang, 2022

Berdasarkan data diatas terdapat alasan anak tidak sekolah, umur anak, jenis kelamin beserta totalnya. Alasan ATS yang lulus tidak lanjut paling banyak disebabkan karena faktor tidak ada biaya sebanyak 103 ATS, yang kedua faktor bekerja sebanyak 48 ATS. Ketiga faktor tidak mau sekolah sebanyak 34 ATS. Keempat faktor menikah sebanyak 24 ATS. Faktor sekolah tidak penting sebanyak 5 ATS. Kelima faktor sekolah jauh sebanyak 4 ATS dan terakhir faktor pengaruh lingkungan sebanyak 3 ATS.

3. Komunikasi dan Koordinasi antara Pelaksana Program dengan Kelompok Sasaran

Komunikasi adalah suatu kegiatan interaksi atau peristiwa transmisi informasi, yang merupakan proses menyampaikan informasi yang dilakukan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol digunakan berupa pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya (Somad, 2020).

Koordinasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan kegiatan dari unit kerja yang terpisah dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara efektif (Febrian & Yusran, 2021). Implementasi kebijakan yang baik dapat dihasilkan dari adanya

komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan.

Bentuk komunikasi yang dilakukan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran yaitu dengan cara rekonfirmasi. Rekonfirmasi terdiri dari dua kata yaitu Re yang berarti menanyakan dan Konfirmasi yang artinya penegasan; pengesahan; membenaran. Jadi rekonfirmasi adalah menanyakan kembali kebenarannya. Tim NSM melakukan tahapan rekonfirmasi data secara sadar dengan mendatangi atau menghubungi seseorang untuk mempertegas data ATS yang telah diperoleh pada saat pendataan. Tim NSM dapat menjelaskan bahwa di desa tersebut terdapat data *by name by address* (ada nama dan alamat pasti) maka tim dapat melakukan kunjungan ke rumah untuk bertemu ATS dan orangtuanya.

Berikut wawancara dengan Ikmaludin Aziz selaku PIC Program *Njuh Sekolah Maning*:

“Rekonfirmasi data itu menanyakan kembali apakah betul anak tersebut berminat kembali ke sekolah, bagaimana dengan respon kedua orangtuanya, apakah mereka juga mendukung kalau anaknya akan disekolahkan, sekaligus memastikan juga bagaimana dengan data yang ada di rumahnya, apakah masih tersimpan seperti rapor sekolah, ijazah terakhir sekolah . Jika kategori ATS tersebut adalah Lulus Tidak Lanjut, jika putus sekolah berarti ditanya kembali putus pada kelas berapa, dan punya dokumen apa yang dimiliki, jika ATSnya kategori tidak sekolah tapi usia sekolah maka ditanyakan juga apakah mereka itu masuk kategori anak berkebutuhan khusus atau tidakk

Gambar 5. Rekonfirmasi Anak Tidak Sekolah



Sumber: Dokumentasi Tim Koordinasi Program NSM, 2022

Setelah data ATS diperoleh, selanjutnya KMPP dan tim pendata desa akan mengunjungi rumah-rumah ATS guna melakukan rekonfirmasi kesediaan kembali bersekolah kepada ATS dan keluarganya. Selain melakukan rekonfirmasi data, KMPP yang berkunjung kerumah ATS juga melakukan sosialisasi atau menjelaskan Program NSM kepada ATS dan keluarganya sehingga memotivasi ATS untuk kembali bersekolah di sekolah formal maupun non formal. Setelah tim menyampaikan program NSM kepada orangtuanya, maka setelah itu orangtuanya juga menyampaikan ke anaknya dan merayu ATS untuk kembali bersekolah. Apabila ATS sudah dirayu dan dibujuk tetap tidak mau kembali sekolah formal, maka akan disarankan kembali ke sekolah non formal atau PKBM, jika tetap tidak mau maka bisa disarankan untuk ke pendidikan informal seperti kursus atau mengikuti pelatihan di balai latihan kerja.

Tim harus memiliki kesabaran dan ketelatenan dalam melakukan rekonfirmasi, karena biasanya anak cenderung tidak mau menjawab pertanyaan dan penawaran dari tim yang datang kerumah. Kunjungan yang

dilakukan KMPP kerumah ATS biasanya dilakukan lebih dari satu kali karena jarang ada ATS dan keluarganya yang langsung bersedia dan langsung termotivasi untuk kembali bersekolah melalui program NSM.

Komunikasi antara pelaksana program dengan ATS yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap ATS dan keluarganya. Setelah tim pendata dan KMPP melakukan kunjungan kerumah ATS untuk pendekatan, kemudian dilanjutkan tahap rekonfirmasi data. Setelah dilakukan tahap rekonfirmasi data maka akan diperoleh data ATS yang bersedia kembali sekolah dan tidak bersedia untuk kembali bersekolah. ATS yang menyatakan kesanggupannya untuk kembali bersekolah akan diundang dan dikumpulkan ke balai desa dengan menghadirkan pihak sekolah formal dan non formal yang akan memberikan formulir pendaftaran kepada ATS untuk diisi dan bisa dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pernyataan di atas, jika dianalisis menggunakan teori Mobilisasi Sumberdaya Anthony Oberscall terdapat jaringan dan partisipasi. Sebuah jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang terdiri dari individu (atau organisasi) disebut “simpul” (*nodes*), yang terikat (terhubung) oleh satu atau lebih tipe hubungan saling ketergantungan tertentu, seperti persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, hubungan kepercayaan, pengetahuan dan prestise. Jaringan sosial tersebut yaitu terjadi komunikasi antara pelaksana program dengan ATS. Pelaksana program mengkomunikasikan secara intens kepada warga masyarakat bahwa ATS butuh pendidikan.

4. Pengembalian ATS

Setelah data terkonfirmasi, kemudian dilakukan kolaborasi bersama untuk mengembalikan ATS. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) arti kata pengembalian adalah cara, proses dan perbuatan mengembalikan. Arti yang lainnya dari pengembalian adalah pemulangan. Setelah mereka menyatakan sanggup untuk kembali bersekolah tim pendata bisa merekomendasikan ATS untuk kembali ke sekolah formal maupun non formal. ATS bisa memilih untuk kembali ke sekolah formal maupun non formal. Berikut ini adalah penjelasan dari sekolah formal dan non formal :

a. Sekolah Formal

Pendidikan Formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Jenjang pada jalur pendidikan ini terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- 1) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program Pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Jika ATS memilih sekolah formal, tim pendata harus menyampaikan beberapa opsi yang menjadi syarat masuk sekolah formal, misalkan, anak Ibu atau Anak Bapak ini kalau dilihat dari data yang dimiliki maka bisa masuk di lembaga formal yakni di sekolah negeri/swasta. Tim akan mengantarkan ATS mendaftar ke pilihan sekolah negeri atau pilihan sekolah swasta yang bersangkutan, tentunya dengan syarat seperti memiliki akte kelahiran, masuk data KK orangtua, dokumen sekolah sebelumnya seperti ijazah ataupun raport, kemudian nanti dibantu untuk mengirimkan berkas tersebut kepada sekolah yang dimaksud. Akan tetapi di Kecamatan Petarukan pada tahun 2022 tidak ada ATS yang memilih kembali bersekolah lewat jalur sekolah formal, hal tersebut senada dengan yang disampaikan Ikmaludin Aziz selaku PIC Program NSM:

“Di Petarukan itu rata-rata masuknya ke PKBM Putra Bangsa semua, untuk di sekolah formal itu tidak ada. Kebanyakan ATS itu sudah bekerja, sehingga ATS lebih memilih untuk melanjutkan ke sekolah non formal”

Anak tidak sekolah sudah banyak yang bekerja, seiring berjalannya waktu juga anak bertambah umurnya, banyak anak yang keluar dari sekolah formal sudah lebih dari dua tahun. Hal tersebut menjadikan ATS merasa tidak percaya diri untuk kembali bersekolah di sekolah formal. Sehingga ATS lebih banyak memutuskan untuk memilih kembali bersekolah di sekolah non formal.

b. Sekolah Non Formal

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang pada umumnya diselenggarakan di luar pendidikan sekolah yang secara potensial dapat membantu dan menggantikan pendidikan formal dalam aspek-aspek tertentu, seperti pendidikan dasar atau

keterampilan kejuruan khusus. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Saat ini pendidikan non formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pendorong perkembangan pendidikan non formal cukup banyak, diantaranya ialah:

- 1) Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah.
- 2) Lapangan kerja, khususnya sektor swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.

Adapun program-program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Pengembalian ATS secara non formal di Kecamatan Petarukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut UNESCO definisi PKBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya (Mustafa Kamil, 2009: 85). Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya.

Sekolah non formal atau PKBM pada tahap penegmbalian alurnya sama, tim pendata atau dari pihak PKBM yang akan memberikan formulir pendaftaran kepada ATS. Tim desa akan mendampingi ATS untuk melakukan pendaftaran ke sekolah yang bersangkutan. Setelah ATS selesai melakukan pendaftaran, sekolah penerima ATS menerbitkan surat yang menyatakan ATS tersebut adalah peserta didik aktif dari sekolah bersangkutan. Selanjutnya sekolah penerima ATS bekerjasama dengan tim koordinasi program NSM untuk mendata ATS yang sudah kembali bersekolah yang akan diajukan ke Sekertariat Program NSM untuk diusulkan sebagai penerima dana bantuan sosial Program NSM yang ditetapkan oleh bupati melalui SK Bupati.

Tahap pengembalian ATS, pada tahun 2022 semua ATS kembali sekolah ke PKBM Putra Bangsa. Berikut profil dari PKBM Putra Bangsa:

- 1) Nama Sekolah : PKBM PUTRA BANGSA
- 2) Nomor Pokok Sekolah Nasional : P2962553
- 3) Jenjang Pendidikan : PKBM
- 4) Status Sekolah : Swasta

- 5) Alamat Sekolah : Desa Kandang
- 6) RT/RW : 14 / 3
- 7) Dusun : Dusun II
- 8) Desa Kelurahan : Kandang
- 9) Kecamatan : Kec. Comal
- 10) Kabupaten : Kab. Pematang
- 11) Provinsi : Prov. Jawa Tengah
- 12) Kode Pos : 52363
- 13) Lokasi Geografis : Lintang -6 Bujur 109

Selain kegiatan belajar mengajar, untuk mengembangkan potensi para peserta didik juga dilakukan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, yang meliputi :

1) Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Barista

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental, kemampuan kreatif, inovatif, dan menciptakan sesuatu dengan kreativitas berwirausaha dalam mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkungan untuk dijadikan bekal berwirausaha dan merintis usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha.

PKBM Putra Bangsa memperoleh kepercayaan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Vokasi sebagai penyelenggara Program PKW dengan keterampilan Barista. PKBM Putra Bangsa mengadakan Pelatihan Paket C Vokasi Kompetensi Keahlian Barista bagi peserta Kejar Paket C. Pelatihan ini menggandeng LSP BPKKA Lembang sebagai

pihak yang mengeluarkan sertifikat berstandar dari Prancis. Sebagai tutornya adalah Barista dari FCS Coffe Shop Pemalang.

Gambar 6. Pelatihan Barista



Sumber: Dokumentasi Program NSM, 2022.

Menurut Tuslihah selaku Ketua PKBM, pelatihan meracik kopi ala barista diberikan kepada lulusan Kejar Paket C karena hasil pertanian kopi di Pemalang cukup melimpah. Selain itu popularitas kopi tengah menjadi trend dengan pangsa pasar yang semakin banyak diminati. Kehadiran Barista ini akan membuat nilai jual kopi yang diracik anak-anak bisa bernilai tinggi, lantaran Barista merupakan seseorang yang ahli dalam meracik kopi.

Sementara untuk meningkatkan minat serta menciptakan pengusaha muda dipilih untuk membuka pelatihan barista dengan harapan kopi asli Pemalang dapat dipopulerkan. Tujuan utama pelatihan ini untuk menciptakan pengusa muda di bidang kopi yang semakin lama popularitasnya terus meningkat. Lebih lagi, seorang barista murni di Pemalang belum terlalu banyak namun pecinta kopinya cukup tinggi.

Berikut hasil wawancara Sukron selaku Barista FCS
Choffe Shop Pernalang:

“pelatihan meracik kopi ala barista ini, PKBM bekerja sama dengan pihak LSP BPKKA Lembang sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat. Dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan dapat memberikan nilai tersendiri bagi barista muda. Karena sertifikat yang dikeluarkan berstandar Prancis.”

Berdasarkan pernyataan di atas, materi yang diajarkan dalam Pelatihan Paket C Vokasi Kompetensi Keahlian Barista tersebut adalah bagaimana cara memilih biji kopi yang baik serta tentang penggunaan alat peracik dari yang manual hingga menggunakan mesin. Pelajaran mendasarnya bagaimana untuk memilih biji kopi yang baik. Kemudian cara penggunaan alat tentunya, karena kemampuan barista selain mampu memilih biji kopi yang baik juga harus mahir mengoperasikan alat. Jika sudah mendapatkan lisensi, bagi barista baru dapat menggunakan sertifikasi tersebut untuk melamar ke berbagai hotel maupun kafe atau dapat digunakan untuk membuka kedai sendiri. Dengan adanya sertifikasi yang telah diterbitkan kemampuan barista telah diakui sebagai peracik kopi.

2) Otomotif dan Pengelasan

Pelatihan Otomotif merupakan pelatihan yang memiliki keahlian profesional sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Kegiatan pelatihan bidang otomotif bagi pemuda dapat memiliki kecakapan hidup berupa keterampilan mekanik bidang otomotif yang dibutuhkan.

Pelatihan otomotif merupakan keterampilan yang harus memiliki keahlian khusus atau profesional. Keahlian mekanik sepeda motor ini memiliki standart keahlian, peserta didik diajarkan berwirausaha dalam mekanik sepeda motor yang perta peserta didik diajarkan jiwa wirausahawan dan kejujuran kemudian di ajarkan pengecekan sistem kelistrikan sehingga peserta didik memiliki keahlian khusus.

Gambar 7. Pelatihan Pengelasan



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023.

Berikut hasil wawancara IA selaku PIC Program NSM:

“biaya tahun 2022 ini berarti ada beasiswa kemarin dari Bank Jateng sejumlah Rp. 250.000.000, Bank Jateng itu digunakan untuk pelatihan 250 ATS yang kembali ke sekolah PKBM dilatih keterampilan tapi kerjasama dengan SMK terdekat. Itu peranak jatahnya Rp.1.000.000 itu digunakan berarti untuk pelatihan anak itu untuk pelatihan di SMK terdekat yang diharapkan setelah pelatihan itu anak lulus dari PKBM anak itu bisa bekerja sesuai dengan bidang yang dilatih itu tadi”.

Berdasarkan pernyataan di atas, ATS yang kembali ke sekolah dapat memilih keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk keterampilan otomotif dapat dilakukan di

SMK terdekat yang bekerja sama dengan program NSM dan PKBM. Setiap anak mendapat bantuan sebesar Rp. 1.000.000,.

Jika dianalisis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya, terdapat sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti : tenaga kerja, pengamanan, keterampilan, dan keahlian. dalam pelatihan tersebut. ATS yang kembali bersekolah dibekali pelatihan yang diharapkan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha.

Implementasi Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* di Kecamatan Petarukan sudah berhasil mengupayakan ATS agar kembali bersekolah melalui program NSM. Berikut rincian penerima program NSM di Kecamatan Petarukan pada Pendidikan non formal:

Tabel 9. Rekap pengembalian Anak Tidak Sekolah Kecamatan Petarukan Tahun 2022

NON FORMAL			
TAHUN	PAKET A	PAKET B	PAKET C
2022	0	68	98
Jumlah	0	68	98

Sumber: Bappeda Kab. Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dari 354 ATS di Kecamatan Petarukan yang kembali bersekolah di Kecamatan Petarukan berjumlah 166 anak. Jenis PKBM yang diambil yaitu Paket B atau setara SMP/Sederajat berjumlah 68 anak, sedangkan paket C atau setara SMA/Sederajat berjumlah 98 anak. Kemudian untuk PKBM, dari 166 ATS yang kembali bersekolah memilih untuk

kembali ke PKBM Putra Bangsa. Berdasarkan data di atas dari 354 ATS yang kembali sebanyak 166 anak. Untuk 188 ATS lainnya masih enggan untuk kembali bersekolah. Akan tetapi tim pendata dan tim koordinasi program NSM terus berupaya dan berusaha untuk mengembalikan ATS tersebut ke sekolah. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tim pendata, ATS di Kecamatan Petarukan yang masih belum kembali bersekolah disebabkan karena selain mengalami kendala keterbatasan ekonomi yang buruk, juga terdapat permasalahan lainnya yaitu sulitnya mengajak ATS untuk kembali bersekolah. Seperti yang disampaikan Roro Budi selaku tim pendata dari Kecamatan Petarukan :

“ATS sangat sulit diajak kembali bersekolah disebabkan banyaknya permasalahan seperti kurang minatnya untuk kembali bersekolah, faktor lingkungan seperti anak yang bergaulnya juga dengan anak yang tidak sekolah jadinya terpengaruh untuk enggan bersekolah dan lebih suka bekerja dari pada sekolah. ATS lebih suka bekerja karena lebih cepat menghasilkan uang dari pada kembali sekolah itu malah membuat mereka mengeluarkan uang sedangkan banyak diantara ATS yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu alasan ATS sulit diajak kembali bersekolah ya karena keberatan dalam biaya operasional harian kayak transportasinya. Sedangkan kalau dari dana bantuan sosial kan digunakan untuk beli alat perlengkapan sekolah seperti tas, buku, sepatu dan seragam”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sulitnya mengajak ATS untuk kembali bersekolah menjadi kendala dalam implementasi program NSM. ATS sulit diajak kembali bersekolah disebabkan karena adanya beberapa permasalahan seperti ekonomi untuk biaya operasional, kemampuan individu setiap anak sehingga menyebabkan kurang minatnya ATS untuk bersekolah, lingkungan

pergaulannya dan arus teknologi misalnya adanya *gadget* menyebabkan anak terpengaruh pergaulan sehingga anak lebih suka bermain dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.

5. Pendampingan ATS

Istilah pendampingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menolong tetapi juga untuk memampukan orang lain untuk menumbuhkan serta mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka entah itu harapan dan impian maupun kemampuan diri serta memahami dan mengenal keberadaan dirinya dalam hubungan dengan sesama. Aart Van beek dalam bukunya menjelaskan bahwa: “mendampingi merupakan suatu kegiatan menolong orang lain yang karena suatu sebab perlu didampingi. Orang yang melakukan kegiatan mendampingi disebut sebagai pendamping. Antara yang didampingi dan pendamping terjadi suatu interaksi sejajar dan atau relasi timbal balik.” Purwadarminta menyatakan, pendampingan merupakan cara atau proses menemani dan menyertai secara dekat, bersaudara dan bersahabat secara akrab, hidup dalam suka dan duka secara bersama-sama, menghadapi kehidupan dengan bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. (Purwasasmita, 2010).

Pendampingan merupakan proses pendampingan individu dengan menempatkan pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Hal tersebut senada dengan pernyataan Andri Adi selaku Camat Kecamatan Petarukan :

“Kalau komunikasi dan koordinasi itu rutin. Kita tetap ada rapat koordinasi dan evaluasi sudah sejauh mana. Dukungan dari pihak kita Kecamatan Petarukan, tim koordinasi program NSM serta tim pendata desa dalam pemantauan dan evaluasi pengembalian ATS termasuk

ATS yang sudah dan masih disekolah, serta mereka yang kembali putus sekolah. Dukungan ini juga melibatkan pengawas/penilik sekolah dan pihak sekolah melalui rapat koordinasi kecamatan. Pendampingan ini bisa dilakukan melalui komunikasi langsung dan tidak langsung.”

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi dilakukan secara rutin baik secara langsung maupun tidak langsung. Rapat koordinasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan ATS yang sudah kembali bersekolah. Dalam pelaksanaan pendampingan dibutuhkan komunikasi. Apabila komunikasi tidak baik, maka pelaksanaan pendampingan ATS tidak berjalan dengan maksimal. Komunikasi menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi program NSM.

Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para aktor kebijakan, sebab tanpa koordinasi setiap aktor tidak mempunyai pegangan yang harus dipedomani sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri (Suryana & Rendeo, 2020). Untuk menghasilkan pelaksanaan implementasi yang baik, maka dibutuhkan adanya komunikasi dan koordinasi antar aktor pelaksana program NSM.

Koordinasi berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan program karena adanya koordinasi antar tim dapat menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi (Rubianti, 2020). Selain itu, dalam pelaksanaan komunikasi memegang peranan penting supaya koordinasi antara pihak dapat berjalan baik.

Proses pelaksanaan pendampingan ATS bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sekolah anak baik dengan cara kunjungan ke rumah langsung maupun ke sekolah anak. Tim pendata desa dan KMPP memastikan keberlanjutan aktivitas ATS yang kembali bersekolah secara periodik. Mekanisme yang digunakan untuk pendampingan ATS adalah

berbasis pesan dan koordinasi melalui sekretariat Program NSM. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga bekerjasama serta melaporkan secara periodik terkait keberlanjutan ATS kepada sekretariat program NSM.

Tim pendata dan KMPP melakukan pendampingan ATS sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya pendampingan ATS diprioritaskan kepada ATS yang keluar dari program NSM. Prioritas kedua ATS yang malas dan berpotensi keluar dari sekolah dan sudah di home visit oleh sekolah. Prioritas ketiga adalah mengunjungi ATS dan keluarganya sekaligus memberikan motivasi. Prioritas keempat mengunjungi ATS di sekolah untuk memberikan motivasi dan menggali umpan balik dari ATS yang dikembalikan. Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pernyataan di atas, jika dianalisis menggunakan teori Mobilisasi Sumberdaya Anthony Oberscall terdapat jaringan dan partisipasi dalam proses pendampingan ATS. Jaringan dan partisipasi dilihat dari bagaimana organisasi mengelola dan merawat jaringan serta partisipasi dalam gerakan sosial. Salah satu perawatan jaringan yang dilakukan adalah dengan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang mendukung program NSM, baik dari instansi pemerintahan, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, tim koordinasi serta dari pihak sekolah dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan ATS yang sudah kembali bersekolah dan mempergiat atau memperluas program gerakan NSM.

Koordinasi dan komunikasi antara tim koordinasi program NSM dengan pihak-pihak terkait pelaksana program NSM dan kelompok sasaran sudah cukup baik. Pada tahap pendampingan, selain dilakukan pendampingan untuk memastikan anak tetap bersekolah atau memantau perkembangan anak selama sekolah juga dilakukan pendampingan untuk

pengambilan dana bantuan sosial. Pendampingan pengambilan dana bantuan sosial dilakukan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah selaku pihak yang juga mendampingi anak untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial di bank terdekat. Informasi dana bantuan sosial tersebut diperoleh pihak sekolah dari tim koordinasi program NSM yang disampaikan pada kordinator tingkat kecamatan sehingga pihak sekolah menunggu informasi terbaru mengenai waktu pencairan dana dari Kordinator Tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait waktu pengambilan dana bantuan sosial, kemudian Tingkat Kecamatan baru akan menginformasikan kepada pihak sekolah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa program NSM di Kecamatan Petarukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang Jaya. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada ATS yang kembali bersekolah baik formal maupun formal. Hal senada dengan pernyataan Ikmaludin Aziz selaku PIC program NSM:

“Untuk dana program NSM itu dari APBD. Kalau untuk ATS yang kembali ke sekolah formal itu biasanya dicairkan melalui bank. Untuk yang non formal biasanya langsung diberikan ke PKBM. Adapun rincian anggaran APBD kabupaten untuk jenjang SD/MI sebesar Rp.800.000/tahun. Pada jenjang SMP/MTs sebesar Rp.1.000.000/tahun dan untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar Rp.1.400.000/tahun”

Rincian bantuan biaya Pendidikan bagi pengembalian ATS Program Gerakan Njuh Sekolah Maning sebagai berikut:

- a. Jenjang SD/MI sebesar Rp800.000/siswa setiap 1 (satu) tahun
- b. Jenjang paket A sebesar Rp800.000/siswa setiap 1 (satu) tahun
- c. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp1.000.000/siswa setiap 1 (satu) tahun

- d. Jenjang paket B sebesar Rp1.200.000/siswa setiap 1 (satu) tahun
- e. Jenjang SMA/SMK/MA sebesar Rp1.400.000/siswa setiap 1 (satu) tahun
- f. Jenjang paket C sebesar Rp1.400.000/siswa setiap 1 (satu) tahun

Berdasarkan pernyataan di atas, jika dianalisis menggunakan Teori Mobilisasi Sumberdaya Anthony Oberschall terdapat sumberdaya material. Sumberdaya material diartikan sebagai modal fisik dan finansial meliputi sumber-sumber: moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan dan perbekalan. Terlihat bahwa program NSM menggunakan dana APBD kabupaten. Pemberian bantuan dana sosial APBD Kabupaten diberikan satu tahun sekali. Bantuan yang diberikan ATS diharapkan bisa meringankan ATS yang digunakan untuk keperluan sekolah seperti membeli tas, buku, sepatu, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program NSM di Kecamatan Petarukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun di Kabupaten Pematang Jaya.

BAB V

DAMPAK PROGRAM NJUH SEKOLAH MANING

TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN EKONOMI

A. DAMPAK PENDIDIKAN

1. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. (BPS Pemalang, 2022). Berikut APS Kecamatan Petarukan:

Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kecamatan Petarukan

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
	2021	2022
SD/MI	99.68	102.96

SMP/MTs	92.62	96.21
SMA/SMK/MA	59.10	62.41

Sumber : (BPS, Pemalang 2022)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa APS Kecamatan Petarukan pada semua jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2022, nilai APS SD/MI sebesar 102,96 persen. Ini mengandung makna bahwa partisipasi sekolah pada usia 7 sampai 12 tahun di Kecamatan Petarukan sebesar 102,96 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APS mengalami peningkatan sebesar 3,28 persen. Pada tahun 2022, nilai APS SMP/MTs sebesar 96,21 persen. Ini mengandung makna bahwa partisipasi sekolah pada usia 13 sampai 15 tahun di Kecamatan Petarukan sebesar 96,21 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APS mengalami peningkatan sebesar 3,59 persen. Nilai APS SMA/MA/SMK pada tahun 2022 sebanyak 62,41 persen. Ini mengandung makna bahwa partisipasi sekolah pada usia 16 sampai 18 tahun di Kecamatan Petarukan sebesar 62,41 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APS mengalami peningkatan sebesar 3,31 persen

2. Peningkatan Angka Partisipasi Murni

APM merupakan indikator untuk menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil (sementara penyebutnya sama). APM membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil karena menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk

sementara waktu, dan lulus lebih awal. Seperti halnya APK, APM juga bisa diterapkan untuk jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA.

Angka partisipasi murni adalah persentase penduduk berumur 7-12 tahun yang bersekolah di SD. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) sekolah penduduk usia 7-12 tahun. Angka partisipasi murni SLTP adalah persentase penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah di SLTP. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi sekolah (murni) penduduk usia sekolah SLTP. Angka partisipasi murni SLTA adalah persentase penduduk berumur 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) sekolah penduduk usia sekolah SLTA. Secara umum APM akan selalu lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Berikut APM Kecamatan Petarukan:

Tabel 11. Angka Partisipasi Murni (APM) Kecamatan Petarukan

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni	
	2021	2022
SD/MI	98,49	101,87
SMP/MTs	79,51	83,42
SMA/SMK/MA	48,18	51,91

Sumber: BPS Pemalang, 2022

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa APM Kecamatan Petarukan pada semua jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2022, nilai APM SD/MI sebesar 101,87 persen. Ini mengandung makna bahwa sebanyak 101,87 persen anak umur

7 sampai 12 tahun di Kecamatan Petarukan sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD/MI. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APM mengalami peningkatan sebesar 3,38 persen. Pada tahun 2022, nilai APM SMP/MTs sebesar 83,42 artinya sebanyak 83,42 persen anak usia 13-15 tahun sedang mengenyam pendidikan SMP/MTs. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APM mengalami peningkatan sebesar 3,91 persen. Nilai APM SMA/MA/SMK pada tahun 2022 sebanyak 51,91 persen artinya sebanyak 51,91 persen anak usia 16-18 tahun sedang melangsungkan pendidikan di tingkat SMA/MA/SMK. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APM mengalami peningkatan sebesar 3,73 persen.

3. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar

Indikator APK digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Tetapi indikator ini lebih banyak bercerita tentang keberhasilan sistem pendidikan dalam mendidik anak dan remaja, bukan pada penduduk dewasa. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan seperti program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi kasar SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD dengan penduduk yang berusia 7-12 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi sekolah (kotor) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Angka partisipasi kasar SLTP

diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTP dengan penduduk usia SLTP yaitu 13-15 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi sekolah (kotor) penduduk pada jenjang pendidikan SLTP. Ini juga dapat menunjukkan kemampuan pendidikan SLTP dalam menyerap penduduk usia 13-15 tahun. Angka partisipasi kasar SLTA diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTA dengan penduduk usia 16-18 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi sekolah (kotor) penduduk pada jenjang pendidikan SLTA. Berikut APK Kecamatan Petarukan:

Tabel 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kecamatan Petarukan

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022
SD/MI	107,79	111,49
SMP/MTs	88,86	91,89
SMA/SMK/MA	72,03	75,97

Sumber: BPS Pemalang, 2022.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa APK Kecamatan Petarukan pada semua jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2022, nilai APK SD/MI sebesar 111,49 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APK mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen. Pada tahun 2022, nilai APK SMP/MTs sebesar 91,89 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APK mengalami peningkatan sebesar 3,03 persen. Nilai APK SMA/MA/SMK pada tahun 2022 sebanyak 75,97 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 APK mengalami peningkatan sebesar 3,94 persen.

Wujud dalam keberhasilan program pemerintah dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah. Menurut Rodliyah (2013), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi dalam suatu kelompok yang dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam mencapai keberhasilan sebuah program (tujuan). Ukuran tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang memasuki jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA/se-Derajat) terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan setiap tahunnya. Sama halnya dengan keberhasilan program NSM tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program NSM.

Program NSM merupakan program di bidang pendidikan yang penting serta harus terus diupayakan oleh pemerintah demi memperbaiki mutu masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya di Kecamatan Petarukan. Namun realitanya, masih banyak sebagian masyarakat yang enggan mendukung sepenuhnya dalam mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan dengan program gerakan NSM yang merupakan program pemerintah. Dapat diketahui dari APS, APM dan APK di Kecamatan Petarukan, meskipun mengalami peningkatan, akan tetapi dalam implementasi program NSM dirasa kurang optimal. Hal tersebut senada dengan pernyataan Khusnul Amalia selaku Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas):

“memang APS, APM dan APK sebagai indikator penting dalam pendidikan itu terjadi peningkatan pada tahun 2022 setelah adanya program NSM. Walaupun ada peningkatan pada indikator itu ya tetapi sebenarnya itu belum sesuai dengan target kita. Masih harus tetap kita upayakan agar optimal sesuai dengan harapan kita. Kenapa belum optimal itu karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program ini. Masyarakat itu kan sebagai sasaran utama program ini, dimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program NSM sebagai peningkatan pendidikan itu penting. Tapi malah sebagian masyarakatnya

masih belum bisa berpartisipasi untuk program ini itu kebanyakan adanya kendala ekonomi, masyarakat dengan ekonomi lemah susah untuk mengakses layanan pendidikan. Kadang budget nya juga tidak ada, buat makan saja susah. Mereka masih mending gak sekolah dari pada gak makan. Jadinya ada program ini pun mereka ya engga pada mikirin sekolah lagi. Sekolah yang masih jauh belum tersedia di sekitar mereka juga jadi membatasi pengetahuannya dalam mengakses pendidikan”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa APS, APM dan APK mengalami peningkatan, akan tetapi realisasi dalam menekan ATS ternyata belum mencapai titik minimum. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala dalam upaya pengentasan ATS salah satunya karena rendahnya peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. Faktor yang menjadi kendala dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan yakni masalah ekonomi masyarakat yang masih buruk. Angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi menjadi pokok masalah dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Kecamatan Petarukan

Sementara itu, sasaran peningkatan partisipasi sekolah terutama untuk masyarakat ekonomi lemah didukung dengan peningkatan sarana prasarana. Wujud pemerintah dalam hal ini yakni dengan adanya program NSM yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk ATS yang ingin kembali bersekolah, upaya tersebut diharapkan sebagai bentuk pemerataan penyediaan sekolah bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan pernyataan diatas, jika dianalisis menggunakan Teori Mobilisasi Anthony Oberschall terlihat belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program NSM. Dampak dari Program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* terhadap pendidikan dilihat dari indikator APS, APM dan APK pada tahun 2022 terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2021 sebelum adanya program NSM. Akan tetapi peningkatan tersebut belum

mencapai target minimum yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan kesulitan mengajak ATS kembali sekolah dan peran masyarakat yang masih kurang. Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan Program NSM. Keberhasilan program NSM memerlukan partisipasi masyarakat untuk memobilisasi ATS dalam mendukung, memotivasi serta mengajak ATS untuk kembali bersekolah baik formal maupun non formal melalui program NSM. Untuk itu jaringan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan dan pelaksanaan program NSM supaya terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pada Pendidikan di Kecamatan Petarukan.

B. DAMPAK EKONOMI

1. Peningkatan Sumberdaya

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang dilakukan oleh PKBM memberikan pengaruh pada peserta pelatihan khususnya ATS yang kembali bersekolah. Pada pelatihan PKW, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya terutama para ATS yang mengikuti pelatihan. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari setiap prosesnya yang memerlukan keahlian dan ketelitian. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Fikri Alazhar selaku ATS yang mengikuti pelatihan PKW:

“Pelajaran mendasarnya bagaimana untuk memilih biji kopi yang baik. Kemudian cara penggunaan alat tentunya, karena kemampuan barista selain mampu memilih biji kopi yang baik juga harus mahir mengoperasikan alat”.

Keahlian dalam pelatihan barista tersebut adalah bagaimana cara memilih biji kopi yang baik serta tentang penggunaan alat peracik dari yang manual hingga menggunakan

mesin. Pelajaran mendasarnya bagaimana untuk memilih biji kopi yang baik. Kemudian cara penggunaan alat tentunya, karena kemampuan barista selain mampu memilih biji kopi yang baik juga harus mahir mengoperasikan alat.

Berdasarkan wawancara tersebut, Fikri Alazhar menjelaskan bahwa mengikuti pelatihan PKW Barista memberikan pengaruh terhadap kemampuan dan keahliannya. Kemampuannya tidak hanya memilih biji kopi yang baik saja, melainkan keahlian dalam proses penggunaan alat peracik dari yang manual hingga menggunakan mesin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelatihan PKW Barista memberikan pengaruh terhadap para ATS yang mengikuti pelatihan. Pengaruh tersebut ialah menumbuhkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

2. Peningkatan Ekonomi

Pelatihan PKW Barista yang dilakukan oleh PKBM Putra Bangsa juga memiliki dampak atau pengaruh pada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sendiri merupakan suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat.

Gambar 8. Penerimaan Sertifikasi Barista



Sumber: Dokumentasi Program NSM, 2022

Gambar 9. Hasil Kopi Pelatihan PKW Barista



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2023

Berikut hasil wawancara Tuslihah selaku ketua PKBM:

“nantinya setelah pelatihan ini selesai akan ada sertifikasi, sertifikat itu bisa digunakan untuk menambah nilai plus Ketika anak itu ingin bekerja di bidang barista di kafe atau hotel, atau bisa juga membuka usaha sendiri. Hasil dari racikan kopinya sendiri juga bisa dijual untuk pendapatan tambahan, saat ini hasil kopinya sudah dititipkan di kedai kedai terdekat nanti hasil penjualan bisa digunakan untuk biaya modal pengembangan dan operasional PKBM”.

Berdasarkan pernyataan di atas sertifikasi tersebut dapat digunakan untuk melamar ke berbagai hotel maupun kafe atau dapat digunakan untuk membuka kedai sendiri. Dengan adanya sertifikasi yang telah diterbitkan, kemampuan barista telah diakui sebagai peracik kopi. Hasil-hasil racikan kopi tersebut dipasarkan untuk dijual kepada masyarakat pecinta kopi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya dampak ekonomi yaitu dapat menambahkan pendapatan tambahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, implementasi program Gerakan *Njuh Sekolah Maning* sebagai upaya pengentasan anak tidak sekolah di Kecamatan Petarukan dilaksanakan dengan adanya kejelasan tujuan program *Njuh Sekolah Maning*, keterlibatan aktor pelaksana, dan prosedur program yang dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain: 1 Sosialisasi, dalam program NSM sosialisasi diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memberitahu, membujuk ataupun mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan serta memanfaatkan adanya sebuah program NSM sebagai program pengembalian anak tidak sekolah. 2 Pendataan, berdasarkan hasil pendataan tim pendata Kecamatan Petarukan terdapat 354 ATS di Kecamatan Petarukan yang terdiri dari 41 ATS belum pernah sekolah, 92 ATS putus sekolah dan 221 ATS lulus tidak lanjut. Berdasarkan hasil pendataan, dari banyaknya ATS di Kecamatan Petarukan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a. tidak ada biaya/ekonomi b. bekerja c. tidak mau sekolah/malas d. menikah/hamil diluar nikah e. pengaruh lingkungan f. sekolah tidak penting g. disabilitas h. sekolah jauh i. kekerasan/trauma/*bullying*.

3. Komunikasi antara aktor pelaksana dengan kelompok sasaran. Bentuk dari komunikasi tersebut yaitu tahapan rekonfirmasi data. 4. Pengembalian ATS, proses pengembalian ATS pada program NSM dapat melalui sekolah formal maupun non formal. Sekolah formal berupa pendidikan dasar seperti SD/MI dan SMP/MTs sedangkan pendidikan menengah seperti SMA/SMK/MA. Pengembalian ATS secara non formal di Kecamatan Petarukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dari 354 ATS,

program NSM sudah berhasil mengembalikan 166 ATS ke sekolah non formal/PKBM. Selain kegiatan belajar mengajar, di PKBM juga dilakukan Pendidikan Keterampilan Wirausaha Barista. 5. Pendampingan ATS, proses pelaksanaan pendampingan ATS bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sekolah anak baik dengan cara kunjungan ke rumah langsung maupun ke sekolah anak.

Bahwa, dampak dari Program Njuh Sekolah Maning terhadap pendidikan dilihat dari beberapa indikator, yaitu : 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan 3. Angka Partisipasi Kasar (APK). Bila dibandingkan pada tahun 2021 sebelum adanya program NSM dan pada tahun 2022 dengan adanya program NSM, terdapat peningkatan dari adanya program NSM terhadap pendidikan yang dilihat dari tiga indikator tersebut . Akan tetapi peningkatan tersebut belum mencapai target minimum yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan kesulitan mengajak ATS untuk kembali bersekolah dan peran masyarakat yang masih kurang. Dampak program NSM terhadap ekonomi yaitu terlihat pada peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan ekonomi.

B. Saran

Saran yang diajukan berdasarkan dari hasil temuan peneliti terkait upaya pengentasan anak tidak sekolah studi pada program Njuh Sekolah Maning di Kecamatan Petarukan yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji Program *Gerakan Njuh Sekolah Maning* sebaiknya melakukan penelitian dari perspektif yang berbeda yang belum ada pada penelitian ini,
2. Untuk pemerintah:
 - a. Mengoptimalkan program NSM dengan terus melakukan sosialisasi yang intensif serta berkesinambungan kepada

masyarakat, orang tua ATS, dan ATS mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Salah satu faktor dari keberhasilan pendidikan yang maju, yaitu adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal mengenai informasi bantuan Pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu.

- b. Perlu adanya kerjasama yang lebih serius antara pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dengan pemerintah desa terutama untuk daerah yang mencakup lingkungan masyarakat menengah kebawah agar memudahkan pemerintah dalam memantau perkembangan pendidikan masyarakatnya.
- c. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan orangtua untuk mengantisipasi masalah putus sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Dwi. 2019. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur Pendekatan Spasial". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 9, No 1, hal 1-17*
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Donggala, Yelly Irene. 2020. "Pendampingan Pastoral Terhadap Keluarga Nelayan". *Jurnal Educatio Christi, Volume 1, Nomor 2, hal 48-61*
- Febrian, F., & Yusran, R. 2021. "Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang". *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 1, hal 11-21*
- Gunawan, Ary. 2011. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamdu, G., & Agustina, L. 2011. "Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar IPA di Sekolah Dasar (Studi Kasus terhadap Siswa Kelas IV SDN Tarumanagara Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya)". *Jurnal Penelitian Pendidikan, Volume 12, Nomor 1, hal 81-86*.
- Hartono, J. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Herdiana, Dian. 2018. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar". *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik Vol. 1, No. 3, hal 13-26*
- Herman, Sofyandi. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Hidayat, T. 2018. "Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Perannya dalam Membina Kepribadian Islami". *Jurnal Mudarrisuna. Vol.8, No. 2, hal 218-244*

- Imron, Ali. 2014. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kamil, Mustofa. 2009. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: CV Alfabeta.
- Kaidah, Sri & Ruslan. 2022. “Dampak Program Indonesia Pintar terhadap Pendidikan Anak pada Keluarga Miskin”. *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, Volume 05, Nomor 03, hal 312-320*
- Karini, Pilih. 2018. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16—18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol. 10, No. 1, hal 103-115*
- Khaerunissa, Zakya & Nurwulan, Riany Laila. 2023. “Dampak Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Partisipasi Bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, Volume IV, Nomor I*
- Kuncoro, Sukmo Ajie. (2018). “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di Kawasan Industri (Studi Kasus di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Larasati, A. W. 2019. “Penanggulangan Putus Sekolah dengan Pelibatan Orang Tua”. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol. 13, No. 2, hal 68-78*.
- Marista, Brigetsa Dwi. (2021). “Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Kecamatan Bantarkawung)”. *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
- Moleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mustari , Andi. Kasmawati, Riswan. 2022. “Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 9, Nomor 3, hal 210-217*
- Noviawati, Suci Murti & Masjidah, Didah. 2020. “Peran Tutor dalam Meningkatkan Motivasi Warga Belajar Keaksaraan Fungsional di PKBM Jayagiri Lembang”. *Jurnal Comm-Edu Volume 3, Nomor 3, hal 199-209*
- Pauziyah, Ulfa. 2018. “Perancangan Sistem Pendataan Penduduk pada Kelurahan Cililitan Jakarta Timur Berbasis Delphi”. *Journal Universitas Indraprasta PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Volume 6, Nomor 3, hal 189-199*
- Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. 2020. “Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 6, Nomor 94, hal 1-8*
- Purwasasmita, Mulyati. 2019. “Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beajar Masyarakat”. *Jurnal Administrasi Pendidikan Volume 7, Nomor 2, hal 122 - 130*
- Putra, Novriasyah., Yudhanto, S. A., & Nur, A. D. P. 2021. “Peranan Dinas Pendidikan terhadap Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan”. *Student Online Journal Volume 2, Nomor 1, hal 144-150*
- Rahmatin, Ummy Zulfa & Soejoto, H Ady Soejoto. 2017. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan, Volume 01, Nomor 02, hal. 127 – 140*

- Ranti, K., Nengah, B. A., & Luh, P. S. 2019. "Upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah di SMP Negeri 1 Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali". *Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1, Nomor 1, hal 12-22*
- Ritzer, G., & J. Stepnisky. 2019. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rohmaniah, Siti. 2019. "Upaya Peningkatan Minat Belajar Anak Putus Sekolah melalui Pendidikan Akhlaq (Kejar Paket) pada Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (QT) Tahun 2019". *Skripsi*. Salatiga: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga
- Rubianti, D. R., Wahyuningrat, W., & Simin, S. 2020. "Studi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sokaraja Kidul". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), Volume 8, Nomor 1, hal 33-46*.
- Rubiyanto, R. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surakarta: PSKGJ FKIP UMS.
- Sidiq, U. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Sulistriani. (2021). "Strategi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir". *Skripsi*. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

- Suryana & Rendeo, H. 2020. "Hubungan Implementasi Kebijakan dan Koordinasi dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Studi pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat)". *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, Volume 10, Nomor 2, hal 35-43*
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Siswa*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, Joko. 2010. *Gender dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Talakua, Y. 2018. "Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon". *Spirit Publik Volume 13, Nomor 1, hal 1-15*.
- Triasmoko, Denny. 2014. "Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Penelitian pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 12, Nomor 1, hal 1-15*
- Uriyalita, F., Jamali, S., & Sumanta. 2020. "Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah tentang Aksesibilitas, Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah *Urban Fringe* Harjamukti, Cirebon". *Edum Journal, Vol 3, No 2, hal 179-199*.
- Wahyuni, R., Jaenam, & Jamurin. 2021. "Peran Pemerintah Nagari dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan". *Science and Research Journal of Mai Wandeu (SRJMW) Volume 1, Nomor 1, hal 87-97*.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Yusuf, A. Muri Yusuf. 1986. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Zakiah, Daradjat. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zuhairini. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://pemalangkab.go.id/profil/kabupaten-pemalang> (Dikases pada 20 Februari 2023 pukul 11.48 WIB).

Wawancara pribadi dengan Bapak Ikmaludin Aziz pada tanggal 23 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan Bapak Andri Adi pada tanggal 3 April 2023

Wawancara pribadi dengan Ibu Khusnul Amalia pada tanggal 10 Mei 2023

Wawancara pribadi dengan Bapak Roro Budi pada tanggal 16 Mei 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Proses Wawancara

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ikmaludin Aziz



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Andri Adi



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Roro Budi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Armi Widyowianti Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 05 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Majalangu RT.04/RW.05
Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
E-mail : armiwidyoputri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

PAUD Mataram : 2006-2007
SD Negeri 03 Majalangu : 2007-2013
SMP Negeri 01 Watukumpul : 2013-2016
SMA Negeri 01 Kedungwuni : 2016-2019
UIN Walisongo Semarang : 2019-sekarang